

**STUDI EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA PENDUKUNG DESA TERTINGGAL (P3DT)
STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S - 2**

**Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh
SUGITO
NIM D4E000073**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TAHUN 2002**

**STUDI EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA PENDUKUNG DESA TERTINGGAL (P3DT)
STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

SUGITO

NIM D4E000073

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal : 25 Juni 2002

Susunan Tim Penguji


Ketua Penguji / Pembimbing I


Drs SUNDARSO, SU

Anggota Dewan Penguji lain :


1. Drs. YUSMILARSO MA

Sekretaris Penguji / Pembimbing II


Dra RETNO SUNU ASTUTI, Msi


2. Dra. DYAH HARIANI, MM

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal 26 Juni 2002



Ketua Program Studi MAP
Universitas Diponegoro Semarang


Prof. Drs Y WARELLA, MPA, PhD

RINGKASAN

Sebagai tindak lanjut Inpres No 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, Pada tahun 1995/1996 s/d 2000 Kabupaten Grobogan, telah mendapat dana Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dari APBN sebesar 21,6 milyar di 157 desa. Untuk mengetahui manfaat program terutama sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan. Fokus analisis penelitian untuk menilai kinerja indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan manfaat (*benefits*) setelah selesainya pelaksanaan program P3DT tahun 2000. Sementara evaluasi kinerja program jarang dilakukan sehingga tidak apakah tujuan program dapat berhasil dicapai dan tidak mengetahui keberhasilan dan kegagalan program.

Hasil analisis penelitian adalah : Indikator masukan (*inputs*) dukungan terhadap pelaksanaan sangat tinggi. Hal ini telah dapat terserapnya dana Rp 4,95 milyar, pelaksanaan sesuai jadwal, pedoman umum, juklak dan petunjuk teknis telah disosialisasikan, partisipasi tenaga kerja wanita, pemuda, penduduk miskin sangat tinggi yang dapat mengurangi pengangguran, adanya aktivitas tinggi dari Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Pelaksana Desa (LKMD), Konsultan Manajemen Teknik, Konsultan Pendamping (KP). Indikator keluaran (*outputs*) keberhasilannya sangat tinggi, karena telah menghasilkan perkerasan jalan sepanjang 79,52 Km, jembatan 21 unit, 202 m, gorong gorong 39 unit, talud 391 m, pasar 26 unit kios dan perpipaan air bersih 2.100 m. Kualitas hasil masih cukup baik, sebab bahan material yang digunakan berkualitas, dan pemeliharaan masyarakat. Indikator hasil (*outcome*) cukup tinggi, karena dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, mempercepat waktu tempuh, mengurangi isolasi daerah dan pengembangan wilayah, cukup meningkatkan mobilitas penduduk dan pekerja ke kota, kemudahan menjual hasil pertanian dan industri kecil, sangat meningkatkan kemampuan teknis, dan dapat meningkatkan pendapatan dan peranan wanita, pemuda, dan penduduk miskin. Indikator manfaat (*benefits*) hasilnya, kurang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha masyarakat, sehingga perlu adanya bantuan modal secara bergulir untuk Usaha Kecil Menengah dan agrobisnis, disamping peningkatan kualitas SDM Aparat dan masyarakat. Akan tetapi sangat mendukung kegiatan sosial, antara lain untuk memperlancar perjalanan anak sekolah, peningkatan pertemuan di tingkat dusun. Manfaat program dapat meningkatkan kelembagaan LKMD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program. Peran serta masyarakat untuk menghadiri pertemuan, kerja bakti, meningkat akan tetapi sumbangan material dan dana sangat terbatas, untuk mengurangi tingginya ketergantungan kepada bantuan pemerintah dan meningkatkan rasa memiliki prasarana yang dibangun, perlu adanya penggalan partisipasi dana dan material. Pelaksanaan P3DT swakelola LKMD, berprinsip Dari, Oleh dan Untuk (DOU) perlu dilanjutkan, sehingga prinsip akuntabilitas, desentralisasi, dan transparansi dapat dilanjutkan dalam pembangunan di perdesaan.

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian Evaluasi Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) di Kabupaten Grobogan adalah untuk menilai manfaat program pembangunan prasarana terhadap dukungan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan penelitian evaluatif dengan menggunakan design penelitian *single program after only*, untuk menilai masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan manfaat (*benefits*) setelah selesainya pelaksanaan program. Hasil penelitian indikator masukan (*outputs*) adalah terserap dana Rp 4,95 milyar, dukungan aktivitas tenaga kerja wanita, pemuda, penduduk miskin, aktivitas Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Pelaksana Desa (LKMD), Konsultan. Indikator keluaran (*outputs*) menghasilkan perkerasan jalan sepanjang 79,52 Km, jembatan 21 unit, 202 m, gorong gorong 39 unit, talud 391 m, pasar 26 unit kios dan perpipaan air bersih 2.100 m. Kualitas hasil masih cukup baik, karena menggunakan bahan material yang berkualitas, dan pemeliharaan masyarakat. Indikator hasil (*out come*) bermanfaat memperlancar transportasi barang, jasa dan manusia dari desa ke kota, membuka daerah terisolir dan mengembangkan wilayah. Indikator manfaat (*benefits*) cukup mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama untuk penciptaan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha masyarakat. Mendukung kegiatan sosial antara lain memperlancar perjalanan anak sekolah, meningkatkan aktivitas pertemuan di tingkat RT, dususun dan desa. Meningkatkan kemampuan kelembagaan (LKMD) mengelola pembangunan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan antara lain meningkatnya aktivitas penduduk untuk menghadiri pertemuan,, meningiti kerja bakti.

Kata-kata kunci : evaluasi, pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan

ABSTRACT

The goals of the research concerned on the development of supporting infrastructures for Poorly Areas Evaluation in Grobogan Regency are to estimate the use of the program for supporting the socioeconomic activities and the increasing of the capability of any institutions at rural areas. The methods of this research is evaluative research by using the single program after only design research, for all inputs, outputs, outcomes, and it benefits after the program has been completely finished. The results of this research for research indicator was Rp4.95 billions, the supporting for women employee activities, youngsters, poor people, and the activities of Regency Coordination Team, village implementers (LKMD), and consultants. The output indicators is finishing the concrete ways for 79.52 km, 21 units of 220m-length-bridge, 21 units of water-channel, 391 dikes, 26 units of market areas, 2,100 meters plumbing for gaining fresh water. The quality is quite good because of good quality of the materials used, and the maintaining. The output indicators are helpful for fastening the transportation from rural areas to urban areas, opening isolated areas, and for developing areas. The benefits indicators are quite supported for any socioeconomic activities, mainly for opening new opportunity works, increasing the income and increment of societal business. Supporting to the societal activities means: making easy way for elementary up to senior high school students, increasing the meeting activities among people at RT, sub-villages, and village levels, supporting the ability of village implementers, supporting the planning, the implementation and the using village developing management. Besides, it also supports the increasing the participation of people in many ways, such as succeeding every meeting held by the institutions at village levels, increasing the people enthusiasm for joining volunteer work.

Key words: evaluation, development, planning, implementation, and benefits.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat, yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 25 Juni 2002


SUGITO

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rachmat-Nya kepada penulis , sehingga telah dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tesis ini merupakan karya ilmiah yang menjadi persyaratan untuk menyelesaikan Studi Program Studi Magister Ilmu Administrasi , Konsentrasi Magister Administrasi Publik, pada Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Drs Y Warella, MPA, PhD Ketua Program MAP, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Drs Sundarso, SU selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
3. Ibu Retno Sunu Astuti, Msi selaku dosen pembimbing kedua, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga dapat menyelesaikan tesis
4. Bapak Gubernur Propinsi Jawa Tengah yang telah memberi ijin belajar untuk melanjutkan kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro Semarang.

5. Kepala Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Grobogan beserta Staf, yang telah membantu memberikan data, informasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini;
6. Kepala Desa Geyer, Kepala Desa Klampok, dan Kepala Desa Ngambakrejo Kabupaten Grobogan yang telah mendampingi dan membantu wawancara dengan para responden;
7. Teman-teman di Kantor Balitbang Propinsi Jawa Tengah, dan Keluarga yang telah memberikan dorongan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan senantiasa penulis terima dengan senang hati

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini ada manfaatnya.

Semarang, 25 Juni 2002

Penulis

SUGITO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
ABTRACT	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori / Pengkajian Teoritis.....	15
B. Pembahasan Penelitian yang relevan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Rancangan Penelitian Perspektif Pendekatan Penelitian.....	29
B. Ruang lingkup Fokus Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31

D. Variabel Penelitian.....	31
1. Klasifikasi variabel.....	31
2. Difinisi Konseptual	31
3. Difinisi Operasional	32
E. Jenis dan sumber data.....	34
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik analisis Data.....	41
I. Sistematika laporan.....	42
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	43
A. Masukan (<i>Outputs</i>).....	43
B. Keluaran (<i>Outputs</i>).....	71
C. Hasil (<i>Outcomes</i>).....	82
D. Manfaat (<i>Benefits</i>).....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
A. KESIMPULAN.....	117
B. SARAN.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	129

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
1	Skema Lingkaran Kemiskinan	3

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
I -1	Desa penerima Program P3DT Tahun 1995/1996 s/d 2000	8
I -2 :	Jumlah dana Program P3DT Tahun 1995/1996 s/d 2000	9
I -3	Kerangka Kerja Logis (KKL) P3DT di Kab. Grobogan	22
III.1	Nama desa dan jumlah pekerja Program P3DT	35
III.2	Nama desa dan jumlah sampel	36
VI-1	Alokasi dan realisasi penyerapan dana	46
VI-2	Jadwal kegiatan program	49
VI-3	Jadwal pelaksanaan program	50
VI-4	Penyerapan tenaga Kerja	52
VI-5	Keluaran dan jenis kegiatan program	76
IV-6	Manfaat terhadap penciptaan lapangan kerja	83
IV-7	Tingkat cakupan pembangunan prasarana	84
IV-8	Tingkat sasaran program pembangunan prasarana	85
IV-9	Tingkat pengembangan wilayah dan isolasi daerah	86
IV-10	Tingkat kecepatan waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan atau ke Pasar	88
IV-11	Tingkat mobilitas penduduk dari desa ke kota	89
IV-12	Tingkat kemudahan penjualan hasil pertanian dan Produksi industri masyarakat	90

IV-13 Tingkat pengaruh terhadap harga barang kebutuhan masyarakat	91
IV-14 Tingkat pemakaian alat transportasi modern	92
IV-15 Tingkat mobilitas penduduk dan Tenaga kerja	94
IV-16 Tingkat kemampuan masyarakat dalam pembuatan usulan pemakaian alat transportasi modern	96
IV-17 Tingkat aktivitas mengikuti pertemuan perencanaan	97
IV-18 Tingkat kemampuan teknis masyarakat melakukan pemb.	99
IV-19 Tingkat Intensitas pelaksanaan koordinasi	100
IV-20 Peranan pemuda, wanita dalam pembangunan	101
IV-21 Manfaat terhadap peningkatan usaha masyarakat	105
IV-22 Manfaat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	106
IV-23 Manfaat terhadap peningkatan kegiatan sosial , kelancaran perjalanan anak sekolah	107
IV-24 Perencanaan tindak lanjut program	109
IV-25 Tingkat kemampuan memelihara proyek	110
IV-26 Perencanaan tindak lanjut program	112
IV-27 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	113
IV-28 Tingkat ketergantungan bantuan pemerintah	115

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul	Halaman
1.	Daftar Pertanyaan	129
2.	Analisis Hasil Masukan (Input) dan Keluaran (Output)....	145
3.	Analisis Hasil Hasil (Outcomes) dan Manfaat (Benefits).....	147
4.	Data dasar hasil penelitian	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan merupakan masalah utama dalam pembangunan di Indonesia, hal ini sebagai akibat implikasi dari masalah pembangunan yang bersifat multidimensional. Berdasarkan data BPS tahun 1999 Jumlah penduduk miskin Indonesia 37,5 juta jiwa, (18,2%), dimana 25,1 juta di perdesaan, sedang jumlah desa tertinggal di Indonesia sebanyak 24.251 desa (BPS dalam Mashuri dan Syarif Hidayat 2001 : 82)

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih besar meskipun jumlahnya mengalami penurunan, dari tahun 1984 6,5 juta (24,17%), tahun 1987 turun menjadi 5,55 juta (19.12%), tahun 1990 4,90 juta (17,49%) tahun 1993 turun menjadi 4,61 Juta (15,78 %). Sejak tahun 1996 dan dengan adanya krisis ekonomi jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 6,4 juta (21,61%) pada tahun 1996 naik menjadi 8,75 juta (28,46%) pada tahun 1999.

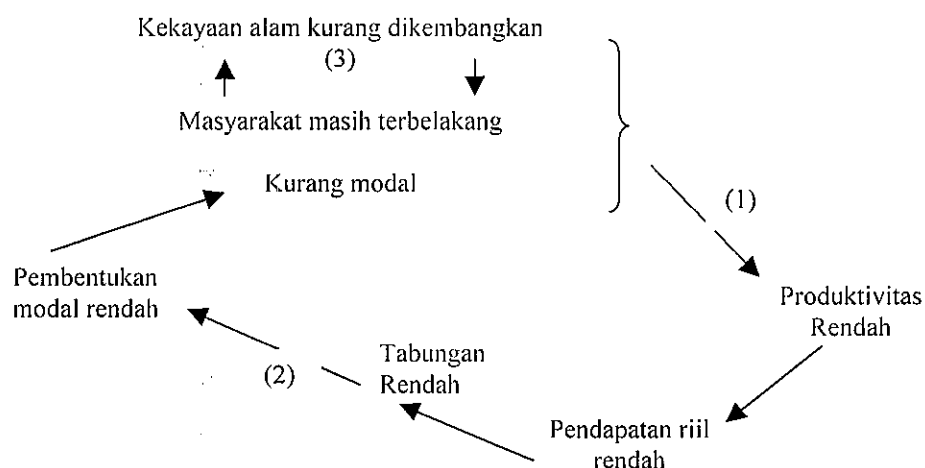
Permasalahan kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. **Faktor internal** menyangkut masalah yang berasal dari individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan manajemen dan teknologi. Sedang **faktor eksternal** terkait

dengan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana, kurang berfungsinya kelembagaan, rendahnya kualitas Aparatur pemerintah desa, kurangnya kesempatan kerja dan berusaha.

Keterisolasian wilayah, disebabkan terbatasnya ketersediaan sarana, prasarana dan pelayanan umum di desa tertinggal. Jaringan jalan, transportasi dan komunikasi merupakan prasarana vital dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah, umumnya kondisinya memprehatinkan. Sehingga mekanisme pasar bekerja tidak efisien, yang ditandai dengan tidak lancarnya arus barang, modal dan tenaga kerja. Harga produk pertanian yang diterima petani umumnya sangat rendah, dan seringkali bahkan tidak ada harganya, karena harga jual petani terpaksa lebih rendah dari biaya produksinya. Sebaliknya petani dan masyarakat di wilayah perdesaan harus membayar barang-barang konsumsi dengan harga sangat tinggi, diluar daya beli mereka.

Pola ini sejalan dengan skema lingkaran kemiskinan yang dikenalkan oleh Ragnar Nurkse (dalam Sadono Sukirno :1985 : 219), yang menyatakan bahwa Kekayaan alam yang dimiliki belum dikembangkan, dan masyarakat masih terbelakang, sehingga tingkat produktivitas rendah yang mengakibatkan pendapatan riil rendah, hal ini berpengaruh terhadap rendahnya rendahnya tabungan dan rendahnya pembentukan modal, akhirnya menyebabkan kekurangan modal dan masyarakat menjadi terbelakang.

Gambar 1 : Skema Lingkaran kemiskinan



Menurut Chambers, (dalam Loekman Soetrisno, 1997: 19). Kemiskinan merupakan *deprivation trap* atau jebakan kekurangan yang saling berkait satu sama lain. Ketidak beruntungan tersebut melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin, yang ada keterkaitannya satu sama lain yang meliputi (1) kemiskinan (*poverty*); (2) fisiknya lemah (*physical weakness*); (3) kerentanan (*vulnerability*); (4) keterisolasian (*isolation*); dan (5) ketidakberdayaan atau *powerless*. Dari kelima dimensi tersebut diatas, kerentanan, ketidakberdayaan dan keterisolasian perlu mendapat perhatian yang utama. Kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, penyakit yang tiba-tiba menimpa penduduk miskin.

Ketidakberdayaan keluarga miskin, disebabkan rendahnya kualitas SDM penduduk miskin dan disebabkan elit desa (Aparat Desa). Dominasi elite desa tersebut tercermin dari kurang demokratis dan

transparansi dalam pengambilan kebijakan dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut program di desa. Beberapa kasus menunjukkan elite desa memfungsikan diri sebagai oknum yang mendistribusikan berbagai bantuan secara tidak adil sampai di keluarga miskin. Bantuan yang seharusnya untuk penduduk miskin akan tetapi dibagikan kepada kelas yang agak mampu .

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui berbagai program baik sektoral, regional dan khusus, berupa bantuan modal, pembangunan prasarana sarana dan pendampingan.

Program untuk penanggulangan kemiskinan tersebut umumnya melalui pendekatan bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan antara lain melalui Poyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Pengembangan Wilayah Propinsi (PPWP), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Program Pengembangan Wilayah Kecamatan Terpadu (PPWKT) Inpres Desa Tertinggal (IDT), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA-KB), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pembangunan Prasaran Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), bantuan kredit lunak dan berbagai program JPS. pada waktu krisis ekonomi.

Program P3DT merupakan program yang strategis sebagai program pendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang

peningkatan penanggulangan kemiskinan terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan yang berasal dari eksternal.

Dana P3DT merupakan dana hibah dari Pemerintah kepada masyarakat desa tertinggal untuk memenuhi kebutuhan prasarana desa sesuai keputusan yang diambil oleh masyarakat, namun tidak mengurangi ketentuan kualitas fisik agar fungsi prasarana bertahan lama untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Filosofi bantuan P3DT adalah memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk : (1) kompetisi dalam seleksi usulan-usulan terbaik dari semua usulan yang diajukan. (2) demokrasi dengan memberikan kesempatan banyak desa berkompetisi dengan usulan dari bawah. (3) transparansi dengan penilaian dan keputusan dilakukan dan dilaporkan secara terbuka (4) kelayakan yaitu usulan yang diterima harus layak secara teknis dan biaya (5) akuntabilitas dengan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.; (6) Kelestarian manfaat dari proyek harus dapat dinikmati lama oleh masyarakat.

Ciri Khas P3DT adalah : (1) desa diberi dana bantuan hibah untuk membangun prasarana yang sesuai kebutuhan masyarakat. (2) dana bantuan disalurkan melalui rekening LKMD (3) administrasi dan pengelolaan dana bantuan dilakukan oleh desa sendiri (4) disetiap desa ditempatkan seorang konsultan (Insinyur) untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, (satu konsultan membantu sekitar 5-6 desa) (5) aparat Pemda hanya berperan sebagai fasilitator dan pembina.

Tujuan umum P3DT adalah merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi yang dibutuhkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di perdesaan. Sedang tujuan khusus program P3DT adalah: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan prasarana yang berkelanjutan dengan indikator : meningkatnya kemampuan aparat desa dalam pembuatan usulan, pelaksanaan dan kelestarian program; (2) menyediakan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang meliputi (a) meningkatkan akses pemasaran dan mengurangi isolasi daerah dengan indikator meningkatnya kelancaran transportasi barang, jasa dan manusia, mengurangi isolasi daerah, menghemat waktu kerja, meningkatkan akses pemasaran / mudah menjual hasil produksi masyarakat, meningkat pemakaian alat transportasi yang modern (sepeda motor, mobil), harga barang kebutuhan menjadi murah, meningkatnya skor variabel desa; (b) meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator kemudahan mendapatkan air bersih, harga air bersih menjadi lebih murah, meningkatnya kesadaran lingkungan , menurunnya angka kesakitan; (3) meningkatkan kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan dengan indikator : meningkatnya kegiatan kelembagaan pembangunan (LKMD) , meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berkurangnya ketergantungan kepada program pemerintah; meningkatnya kegiatan pemuda, peranan wanita dan penduduk miskin; meningkatnya kegiatan

posyandu, PKK dasa wisma (4) menciptakan lapangan kerja dengan indikator meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, berkurangnya jumlah penganggur, setengah penganggur ; (5) memperkuat kemampuan aparat memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan. dengan indikator : tingkat desentralisasi , kemampuan untuk koordinasi , tingkat penyaluran informasi, dinamisator, dan tingkat motivasi penduduk.

Prinsip Dasar P3DT adalah (1) P3DT mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan LKMD. (2) mengutamakan partisipasi semua lapisan masyarakat terutama kelompok miskin, pemuda dan wanita. (3) menggunakan prinsip keterbukaan semua informasi. (4) mengutamakan kualitas konstruksi (5) pengalihan teknologi dan ketrampilan.

Program P3DT di Jawa Tengah merupakan program strategis untuk mempercepat pengurangan jumlah desa tertinggal dengan meningkatkan variabel skor desa . Sejak tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 2000 , Propinsi Jawa Tengah telah dialokasikan dana sebesar Rp 396,65 milyar tersebar 3.086 desa di 28 Kabupaten . Adapun rincian jumlah dana dan desa per Kabupaten seperti pada Tabel I.1 dan Tabel I.2

Tabel I.1
Jumlah desa penerima Program P3DT di Jawa Tengah
Tahun 1995/1996 s/d 2000

NO	KABUPATEN	1995/ 1996	1996/ 1997	1997/ 1998	1998/ 1999	1999/ 2000	2000	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBUMEN	35	10	30	35		40	150
2	BREBES		15	30	40	70	32	187
3	REMBANG	5	10	35	35	63	42	190
4	BATANG	30	10	30	40			110
5	TEGAL		10	30	35			75
6	WONOGIRI		10	10	20		43	83
7	PURWOREJO	20	20	35	25	60	48	208
8	MAGELANG		15	10	25	62	48	160
9	PEKALONGAN		10	15	20		31	76
10	PATI	10	10	10	20		47	97
11	WONOSOBO	10	10	20	20	48		108
12	BLORA		15	10	25	65	47	162
13	BOYOLALI		20	10	30			60
14	BANYUMAS		5	10	30	63	41	149
15	TEMANGGUNG		10	10	25	60	48	153
16	BANJARNEGARA	20	20	10	25		33	108
17	PEMALANG		10	10	30	49		99
18	KLATEN		10	15	15		48	88
19	GROBOGAN	15	15	15	25	57	30	157
20	CILACAP		10	10	20	53	30	123
21	DEMAK		10	10	15			35
22	PURBALINGGA		5	15	25		41	86
23	KENDAL		10	15	15	52	42	134
24	SEMARANG		5	10	20		33	68
25	SRAGEN		10	15	15	60		100
26	SUKOHARJO		10	10	10			30
27	JEPARA		5	15	10		35	65
28	KARANGANYAR		10	10	5			25
	JUMLAH	145	310	455	655	762	759	3,086

Sumber : Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2001

Tabel I. 2
Jumlah dana Program P3DT di Jawa Tengah
Tahun 1995/1996 s/d 2000
(dalam ribuan rupiah)

NO	KABUPATEN	1995/ 1996	1996/ 1997	1997/ 1998	1998/ 1999	1999/ 2000	2000	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KAB. KEBUMEN	4,200	1,200	3,600	4,900		6,000	19,900
2	KAB. BREBES	0	1,800	3,600	5,600	10,500	4,500	26,000
3	KAB. REMBANG	600	1,200	4,200	4,900	7,500	4,500	22,900
4	KAB. BATANG	3,600	1,200	3,600	5,600		0	14,000
5	KAB. TEGAL	0	1,200	3,600	4,900		0	9,700
6	KAB. WONOGIRI	0	1,200	1,200	2,800		6,000	11,200
7	KAB. PURWOREJO	2,400	2,400	4,200	3,500	6,750	6,000	25,250
8	KAB. MAGELANG	0	1,800	1,200	3,500	6,750	6,000	19,250
9	KAB. PEKALONGAN	0	1,200	1,800	2,800		4,500	10,300
10	KAB. PATI	1,200	1,200	1,200	2,800		6,000	12,400
11	KAB. WONOSOBO	1,200	1,200	2,400	2,800	6,750	0	14,350
12	KAB. BLORA	0	1,800	1,200	3,500	9,000	6,000	21,500
13	KAB. BOYOLALI	0	2,400	1,200	4,200		0	7,800
14	KAB. BANYUMAS	0	600	1,200	4,200	7,500	6,000	19,500
15	KAB. TEMANGGUNG	0	1,200	1,200	3,500	5,250	6,000	17,150
16	KAB. BANJARNEGARA	2,400	2,400	1,200	3,500		4,500	14,000
17	KAB. PEMALANG	0	1,200	1,200	4,200	6,750	0	13,350
18	KAB. KLATEN	0	1,200	1,800	2,100		6,000	11,100
19	KAB. GROBOGAN	1,800	1,800	1,800	3,500	8,250	4,500	21,650
20	KAB. CILACAP	0	1,200	1,200	2,800	7,500	4,500	17,200
21	KAB. DEMAK	0	1,200	1,200	2,100		0	4,500
22	KAB. PURBALINGGA	0	600	1,800	3,500		6,000	11,900
23	KAB. KENDAL	0	1,200	1,800	2,100	5,250	6,000	16,350
24	KAB. SEMARANG	0	600	1,200	2,800		4,500	9,100
25	KAB. SRAGEN	0	1,200	1,800	2,100	6,000	0	11,100
26	KAB. SUKOHARJO	0	1,200	1,200	1,400		0	3,800
27	KAB. JEPARA	0	600	1,800	1,400		4,500	8,300
28	KAB. KARANGANYAR	0	1,200	1,200	700		0	3,100
	JUMLAH	17,400	37,200	54,600	91,700	93,750	102,00	396,650

Sumber : Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2001

Berdasarkan Tabel I.1 dan I.2 : Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten penerima bantuan secara berturut-turut selama 6 tahun mulai tahun 1995/1996 sampai dengan 2000, dengan dana yang cukup besar yaitu Rp 21,6 milyar tersebar di 157 desa . Adapun perkembangan bantuan per tahun sebagai berikut : Tahun 1995/1996 Rp 1,8 milyar (15 desa), 1996/1997 Rp 1,8 milyar (15 desa), 1997/1998 Rp 1,8 milyar 15 desa, 1998/1999 Rp 3,5 milyar (25 desa) 1999/2000 Rp 8,250 milyar (57 desa) dan pada tahun 2000 Rp 4,5 milyar (30 desa)

Kabupaten Grobogan mempunyai desa tertinggal sebanyak 87 desa, disamping masih mempunyai desa non IDT yang masih memerlukan prasarana dan sarana. Berdasarkan laporan Konsultan Bank Dunia Kabupaten Grobogan dinilai mempunyai kinerja pengelolaan Program yang terbaik, dari 28 Kabupaten penerima Program P3DT di Jawa Tengah. Meskipun Kabupaten Grobogan telah menerima bantuan modal bergulir melalui program IDT, program P3DT sebesar Rp 21,6 milyar dan Konsultan pendampingan, ternyata belum dapat mengurangi jumlah penduduk miskinnya. Sesuai data BKKBN tahun 2000 Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk miskin (Pra KS) terbanyak di Jawa Tengah, yaitu 271.890 KK atau 6,16 persen, yang terdiri dari jumlah Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) sebanyak 235.789 KK dan Keluarga Sejahtera I (KS 1) sebanyak 36.101 KK

Disamping itu pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 1990-2000 relatif masih tinggi yaitu sebesar 1,03% pertahun, atau masih diatas rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 0,84%. Dengan tingginya pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi meningkatnya penduduk usia kerja, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penganggur dan setengah penganggur.

Kualitas SDM Kabupaten Grobogan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2000, sebagian besar penduduk berpendidikan SD kebawah 79,5 %, SLTP 12,77 %, sedang yang tamat SLTA 6,50 % dan Perguruan Tinggi 1,14 %. Berdasarkan kondisi di Kabupaten Grobogan tersebut, maka sangatlah menarik untuk melakukan evaluasi kebijakan Program P3DT yang merupakan salah satu program untuk mengurangi kemiskinan.

Evaluasi kebijakan program mempunyai peranan yang sangat penting, sebab banyak program pemerintah yang selama ini dilaksanakan hanya berorientasi pada pemenuhan target group pembangunan (*out put*), kurang mengetahui kegagalan dan keberhasilan serta tindak lanjut program. Evaluasi kinerja proyek pembangunan masih terbatas pada perkembangan pelaksanaan yang dilakukan melalui sistem pemantauan. sedangkan evaluasi setelah proyek selesai / berfungsi, yang dikenal sebagai *performance evaluation*, belum dilakukan secara sistematis dan melembaga (Kepmen PPN 2000 : 1)

Evaluasi kinerja program adalah bagian dari manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak proyek pembangunan yang telah direncanakan dan / atau telah dilaksanakan , untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan. Evaluasi kinerja proyek pembangunan mencakup hal-hal yang lebih menyeluruh dan lebih menekankan pada umpan balik terhadap hasil , manfaat dan dampak yang diperoleh dari proyek pembangunan .

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mendiskripsikan hasil, manfaat dan dampak pelaksanaan Program P3DT , dan untuk mengetahui pencapaian sasaran dan tujuan, sebab keberhasilan atau kegagalannya, serta berbagai jenis manfaat yang ditimbulkannya. Selanjutnya dengan mengetahui kekurangan, ketidak berhasilan dapat sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kembali kebijakan (*reformulation*) atau penyesuaian (*adjustment*) yang akan datang.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengajukan judul penelitian sebagai berikut :

**STUDI EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
PENDUKUNG DESA TERTINGGAL (P3DT) DENGAN STUDI KASUS DI
KABUPATEN GROBOGAN**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

- a. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin
- b. Masih banyaknya desa tertinggal yang memerlukan pembangunan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi desa
- c. Masih rendahnya derajat kesehatan
- d. Masih besarnya dominasi Aparat desa untuk memutuskan kebijakan pembangunan.
- e. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan
- f. Masih banyaknya penganggur dan setengah penganggur

2. Perumusan masalah

Adapun perumusan masalah yang diajukan adalah :

- a. Apakah Program P3DT dapat bermanfaat untuk meningkatkan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi ?
- b. Apakah Program P3DT bermanfaat dapat meningkatkan kinerja kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai judul yang ditentukan , tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh gambaran tentang manfaat dan dampak pembangunan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi.
2. Memperoleh gambaran tentang peningkatan kinerja kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan .

D. Kegunaan Penelitian :

1. Secara Teoritis / akademis
 - a. Untuk menemukan. dan menguji manfaat, Program P3DT di Kabupaten Grobogan ?.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang sejenis dengan scope lebih luas.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi peneliti, dan dapat sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan tindak lanjut program sejenis P3DT, maupun program lain pada umumnya.

BAB II

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .

1. Evaluasi

Menurut Cook dan Scioli dalam Samodra, dkk (1994 : 3) Suatu kebijakan pada umumnya diterjemahkan dalam bentuk program atau proyek yang diikuti dengan pelaksanaan fisik yang pada akhirnya menimbulkan suatu konsekuensi yang berupa hasil, manfaat maupun dampak. Setiap program mempunyai beberapa tujuan dan setiap tujuan dapat dicapai dengan beberapa tindakan. Tindakan tersebut mengandung beberapa kriteria untuk mengukur keefektifannya. Pencapaian tujuan program dapat menimbulkan kemungkinan dampak tergantung pada keprimeran- sekunderan dampak, maupun kesengajaan dan ketidak sengajaan.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Samodra (1994 : 74) design penelitian evaluasi ada empat jenis evaluasi berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperolehnya yaitu : (1) *evaluasi single program after only* (2) *Single program before after* (3) *comparative after – only* dan (4) *comparative before after*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan design penelitian *single program after only* , dengan membuat penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Adapun sebagai alasan adalah peneliti tidak mengetahui baik-buruknya respons kelompok sasaran terhadap program P3DT dan peneliti tidak mengetahui apakah semakin

baiknya kelompok sasaran itu memang dulu tidak ada dan juga apakah bukan sesuatu yang lain yang menciptakan kondisi yang baik tersebut.

Evaluasi (Dunn 2000 : 608, 609) adalah suatu proses yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan program, terutama berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan / sasaran program. Oleh karena itu, indikator pokok evaluasi pada umumnya berkisar pada (1) sejauhmana kinerja program itu berfungsi dan secara efektif dapat mencapai tujuan yang diharapkan (2) Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Faktor-faktor ini dapat berbeda pada suatu daerah dengan daerah lain sesuai keadaan lingkungan daerah program itu dilaksanakan.

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Fungsi Evaluasi tersebut merupakan Informasi kinerja kebijakan yang dapat untuk mengetahui seberapa jauh tujuan dan target dapat dicapai, untuk memberikan klarifikasi dan kritik terhadap tujuan dan target , hasilnya dapat sebagai rekomendasi untuk merevisi atau penyempurnaan, penghapusan dan penggantian program kebijakan baru.

Evaluasi dampak (Robert R Mayer 1984 : 99 dan Nicholas Henry 1988 : 225) adalah suatu perbandingan antara hasil (*outcome*) yang

dicapai dengan tujuan yang dikehendaki, setelah selesainya pelaksanaan program.

Evaluasi formal (Dunn 2000: 613) adalah pendekatan yang menggunakan metode diskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program . Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk mamangat atau nilai kebijakan program

Evaluasi kinerja pembangunan di Indonesia telah dikembangkan melalui Keputusan Menteri Negara Perencanaan PPN/Ketua Bappenas No Kep.178/K/07/2000. Pengertian evaluasi kinerja pembangunan menurut Kepneg PPN/Kepala Bappenas adalah bagian dari kegiatan manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan , baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca proyek.

Evaluasi kinerja proyek pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan indikator dan sasaran kinerja yang menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapain suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan , yang mencakup masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*results/outcomes*), dan indikator manfaat (*benefits*) serta dampak (*impact*).

Studi evaluasi kinerja adalah suatu upaya yang sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersifat obyektif terhadap hasil, manfaat dan dampak dari proyek tertentu yang telah selesai dilaksanakan ataupun telah beberapa tahun berfungsi , untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambil keputusan dalam merencanakan proyek pembangunan selanjutnya. Dengan demikian kinerja dari proyek pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan dapat lebih ditingkatkan .Evaluasi kinerja tidak menilai prosedur atau proses pelaksanaan proyek pembangunan sebagaimana dilaksanakan tugas dan fungsi pemantauan inspeksi dan auditing.

Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui (1) penyusunan indikator dan sasaran kinerja proyek pembangunan. (2) pelaksanaan studi evaluasi kinerja proyek pembangunan. Penilaian kinerja proyek pembangunan dilakukan dengan membandingkan indikator dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan realisasinya.

Dalam menyusun indikator dan sasaran kinerja diperlukan pemahaman yang baik tentang tujuan proyek, sumberdaya yang tersedia, ruang lingkup kegiatan dan keterkaitan di antara berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk memperoleh hasil, manfaat, dan dampak yang diharapkan. Untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan yang baik tentang sesuatu proyek pembangunan dapat digunakan pendekatan kerangka kerja logis (*logical framework*). Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan matrik ringkasan proyek yang secara rinci

menunjukkan hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, serta tujuan proyek baik secara mikro maupun secara makro. Struktur Kerangka Kerja Logis (KKL) disajikan dalam bentuk matrik 5x4 (5 baris dan 4 kolom) yang menunjukkan tingkatan tujuan proyek, serta hubungan antara masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak proyek. Logika vertikal (*Vertical Logic*) dibaca dari baris ke baris, menjelaskan tentang logika kegiatan proyek. Sedangkan logika horizontal (*horizontal logic*) dibaca dari kolom ke kolom, menjelaskan pencapaian tujuan proyek pada setiap tingkatan. dari KKL ini penilai proyek dapat melihat dengan jelas seluruh kegiatan proyek beserta informasi proyek baik secara kualitatif dan kuantitatif

Berdasarkan teori tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa Studi evaluasi kinerja adalah suatu upaya yang sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersifat obyektif terhadap hasil, manfaat dan dampak dari proyek yang telah selesai dilaksanakan ataupun telah beberapa tahun berfungsi, untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambil keputusan dalam penyempurnaan perencanaan proyek pembangunan selanjutnya.

c. Variabel evaluasi

a. Masukan (*Inputs*)

indikator masukan meliputi : sumber daya, waktu, uang, personil, alat, material yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan dampak . Hampir sama dengan yang disampaikan .Dunn (2000:515) yang menyebutkan Indikator masukan adalah mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan

b. Keluaran (*Outputs*)

Keluaran adalah barang , layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima /beneficiaries (Dunn 2000 : 513) Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan baik fisik maupun non fisik

c. Hasil (*out comes*)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka pendek dan menengah atau efek tidak langsung Menurut Dunn (2000 : 513) Hasil adalah merupakan perubahan nyata pada tingkah laku nyata atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan.

d. Manfaat (*benefits*)

Manfaat adalah yang diperoleh dari indikator hasil , khususnya dalam jangka menengah dan panjang . Indikator ini terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan program

e. Dampak (*impacts*)

Dampak adalah menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan , yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan , tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Merupakan perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari keluaran (*outputs*) kebijakan

Dari indikator evaluasi tersebut peneliti akan mefokuskan penelitian pada evaluasi manfaat (*benefits*), yang diperoleh dari indikator hasil , khususnya dalam jangka menengah dan panjang yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan Program P3DT tahun 2000.

Adapun Kerangka Kerja Logis (KKP) Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) di Kabupaten Grogogan pada tabel I.3

TABEL: I.3
KERANGKA KERJA LOGIS (KKP) STUDI EVALUASI PROGRAM
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA PENDUKUNG DESA TERTINGGAL
(P3DT) DI KABUPATEN GROBOGAN

NO	RINGKASAN	INDIKATOR		PEMBUKTIAN SUMBER DATA	ASUMSI PENTING
		PERENCANAAN	PENCAPAIAN		
I	Manfaat (<i>Benefits</i>) 1. Mendukung peningkatan kegiatan sosial ekonomi 2. Meningkatkan Kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi 2. Meningkatnya kegiatan sosial 3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan 4. Meningkatnya peran serta masyarakat		1. Masyarakat (KK) 2. Aparat desa	1. Kesadaran asyarakat untuk membangun 2. Tersedianya tenaga kon sultan yang berkualitas
II	Hasil (<i>Out come</i>) 1. Memperlancar arus transportasi barang, jasa dan manusia 2. Berkurangnya isolasi daerah 3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam perencanaan , pelaksanaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan 4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program 5. Penyerapan tenaga kerja	1. Kuantitas volume pembangunan prasarana fisik sesuai rencana. 2. Mutu hasil pelaksanaan pembangunan fisik berkualitas. 3. Jenis kegiatan sesuai usulan masyarakat		1. Masyarakat (KK) 2. Aparat desa	1. Tidak ada bencana alam 2. Harga barang stabil 3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan konsultan

Lanjutan Tabel I.3

III	<p>Keluaran (<i>Ouputs</i>) 1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan jembatan 3. Pembangunan air bersih Perpipaan 4. Pembangunan Pasar 5. Pelatihan LKMD/Pokja</p> <p>Kegiatan 1. Persiapan Program <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Tim Koordinasi Kab. ▪ Sosialisasi awal dan penentuan desa yang membuat proposal ▪ Verifikasi dokumen proposal ▪ Pengumuman daftar rangking desa 2. Persiapan dan Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan prioritas verifikasi lapangan ▪ Penetapan daftar desa yang lolos verifikasi lapangan ▪ Penandatanganan SPPB oleh Pimpro dengan LKMD ▪ Penyesuaian pagu dana bantuan dengan hasil survei design dan RAB ▪ Rekapitulasi hasil design dan RAB dan pembentukan cluster 3. Persiapan pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Orientasi teknis di Kabupaten ▪ Penetapan desa penerima bantuan P3DT dengan SK Bupati ▪ Penyuluhan awal di desa untuk Sosialisasi hasil design dan RAB ▪ Pelatihan Kasi PMD Kecamatan ▪ Pembentukan Tim Pelaksana, Monitoring di Tingkat desa ▪ Pelatihan di desa ▪ Penyiapan administrasi pengadaan barang, rencana kerja detail, pembuatan papan informasi papan nama proyek dan lembar informasi </p>	M M Unit M Unit 30 Desa		1. Pimpro 2. Bappeda Kab	1. Harga stabil 2. Dana turun tepat waktu 3. Tersedianya buku Panduan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis 4. Kemampuan Tim Pelaksana Desa (LKMD) yang telah dididik dan dilatih. 5. Kemampuan Konsultan Pendamping yang profesional
-----	--	--	--	-----------------------------	---

Lanjutan Tabel I-3

	<p>4. Tahap Pelaksanaan konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Renc. Kerja ▪ Pelelangan bahan /material ▪ Pelaksanaan pekerjaan oleh masyarakat ▪ Pengawasan, pemantauan dan pengendalian oleh ▪ Kasi PMD dan Konsultan ▪ Monitoring oleh masyarakat (LMD /BKD) ▪ Penyusunan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) oleh LKMD bersama Konsultan ▪ Membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP4) oleh Ketua I LKMD dan Pimpro ▪ Pelatihan Operasi dan pemeliharaan proyek ▪ Serahterima dari Pimpro ke Bupati dan Tim pelaksana (LKMD) kepada masyarakat <p>5. Tahap pemanfaatan</p> <p>Membuat Rencana Operasi prasarana Membentuk organisasi pemeliharaan di Desa</p>				
IV	<p>Masukan (<i>Inputs</i>)</p> <p>1. Metodologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Umum, Petunjuk Teknis pelaksanaan • Jadwal kegiatan <p>2. Bantuan dana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pembangunan fisik • Biaya pembinaan dan administrasi proyek (PAP) <p>3. Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi P3DT • Konsultan Manajemen Teknik (KMT) • Konsultan Pendamping (KP) • Tim Pelaksana Desa (LKMD) • Tenaga kerja 	<p>Rp 4,5 milyar</p> <p>Rp 500 juta</p> <p>10 orang</p> <p>1 orang, 6 orang 30 desa</p>		<p>1. Pimpro</p> <p>2. Bappeda Kab</p>	<p>1. Daftar Isian Proyek (DIP) diproses sesuai juklak</p> <p>2. Tersedia suplier dan material</p>

B. Pembahasan Penelitian yang relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan di Desa Ngliman , Kecamatan Sawahan Kab Nganjuk tahun 1999 oleh Drs Soetrisno Msi, dengan hasil penelitian sebagai berikut :
 - a. Terjadi ketimpangan karena adanya dominasi kepemilikan tanah pertanian oleh pemilik modal akibatnya petani gurem dan buruh tani terperangkap pada ketidak berdayaan.
 - b. Ketidakberdayaan untuk mengakses dan memperoleh sumber ekonomi mengakibatkan kemiskinan struktural yang berdampak menurunnya hasrat untuk maju.
 - c. Adanya ketimpangan penguasaan sumber ekonomi mengakibatkan tidak dapat berkembangnya ekonomi, tidak terjadi perubahan sosial ekonomi.
 - d. Faktor penghambat antara lain kurang hubungan dengan masyarakat luar, kurang fasilitas pendidikan, penguasaan sumber ekonomi, kemampuan untuk memilih alternatif, kurangnya akses informasi, dan sumberdaya, serta budaya otoritarian tradisional pada sistem pemerintahan desa.
 - e. Program pengentasan kemiskinan tidak mampu merubah struktur sosial ekonomi. Masyarakat kurang mampu mengantisipasi perkembangan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, sesuai potensi yang

dimiliki. Disamping itu lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol sosial.

- f. Lemahnya kelembagaan desa, sehingga masyarakat kurang mampu untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengawasan. penanggulangan kemiskinan secara efektif

2. Evaluasi Pasca. Proyek Pemberdayaan Potensi Ekonomi Desa Nelayan (P3EMDN) Jawa Tengah Tahun 1998/ 1999 dan TA 1999/ 2000 oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Kelautan UNDIP Semarang dengan hasil penelitian sebagai berikut

- a. Dalam implementasi permasalahan yang dihadapi berupa administrasi keuangan, kesiapan aparat dalam hal manajemen proyek, kesiapan masyarakat menerima konsep pengembangan masyarakat.
- b. Manfaat Program P3EMDN
 - 1) Ketersediaan prasarana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendukung kegiatan usaha produktif, dan sosial kemasyarakatan
 - 2) Pemberian modal untuk usaha produktif dapat meningkatkan produktivitas, omset, dan pendapatan masyarakat sasaran
 - 3) Manfaat untuk pengembangan kegiatan berorganisasi kelompok usaha belum signifikan, walau pun indikasi adanya adanya perubahan kearah perbaikan sudah ada.

- 4) Manfaat untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat belum nyata
- 5) Dampak yang teridentifikasi dari program P3EMDN adalah adanya kecemburuan masyarakat desa nelayan penerima program dengan desa non penerima program

3. Evaluasi Pasca Program P3DT Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999/2000 dan TA 2000 oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UGM Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Program P3DT tahun 1999/2000 dan 2000 telah dimanfaatkan untuk pembangunan jalan sepanjang 17,48 Km yang dapat meningkatkan akses pemasaran dan membukan isolasi daerah; Pembangunan pasar desa seluas 23.169 meter persegi untuk menunjang terciptanya akses pemasaran komoditi lokal dan komoditi yang diperlukan masyarakat; Pembangunan 1.425 MCK dan 3.633 unit prasarana air bersih ; Dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sebanyak 1.304.663 orang yang terdiri perempuan 13,16%, pemuda (17,96%) dan penduduk miskin (68,88%); Telah dibangun prasarana irigasi sebanyak 131 unit bendung, 163.077 m² saluran irigasi dan 379 unit bangunan irigasi;

- b. Program P3DT dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan , teknis pelaksanaan , administrasi dan manajemen program.
- c. Program P3DT telah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian melalui wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) , yang otomatis dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan.
- d. Manfaat program P3DT dirasakan sangat berarti bagi masyarakat, karena dapat terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana , meningkatkan ketrampilan, dapat menciptakan lapangan kerja , meningkatkan kegiatan kelembagaan, akan tetapi kurang berarti untuk peningkatan pendapatan / pemupukan modal masyarakat
- e. Dampak program terhadap masyarakat adalah meningkatkan polusi dan pencemaran udara, dan resiko kecelakaan. Sedang Dampak terhadap wilayah adalah keterpisahan masyarakat dengan komunitasnya, kesemrawutan dan gangguan keindahan wilayah, dan memungkinkan masuknya budaya asing yang negatif.
- f. Pelestarian program telah dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, baik dalam tenaga, dan penyandang dana .

BAB III

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian / Perspektif Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian di kenal adanya tipe penelitian. adalah sebagai berikut :

a. Penelitian penjajakan (*eksploratif*).

Bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa, sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk penelitian penjelasan dan penelitian deskriptif.

b. Penelitian penjelasan (*eksplanatory*)

Menyoroti hubungan antara variabel-variabel dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya, oleh karena itu dinamakan juga penelitian hipotesa.

c. Penelitian deskriptif

Biasanya mempunyai dua tujuan pertama untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan hasilnya dicantumkan dalam tabel-tabel frekuensi. Kedua untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena tertentu. (Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1995 :8)

d. Penelitian evaluasi

Seacara umum penelitian evaluasi terdiri dari evaluasi formal dan dan evaluasi summantif . Evaluasi formal adalah untuk melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program , mencari umpan balik untuk

memperbaiki pelaksanaan program tersebut. Sedangkan Evaluasi summantif dilaksanakan pada pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan program tersebut tercapai. (Masri Singarimbun 1995 program tersebut tercapai. (Masri Singarimbun 1995: 5)

Dari adanya teori diatas, peneliti akan menggunakan penelitian evaluatif khususnya evaluasi summantif, dilaksanakan pada pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan pogram P3DT dapat tercapai. Peneliti akan mengadakan evaluasi yang terkait dengan tujuan fungsional program terutama pada manfaat program terhadap (1) penyediaan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi dan (2) meningkatkan kemampuan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;.

B. Ruang Lingkup / Fokus Penelitian

Ruang lingkup pelaksanaan studi Evaluasi Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dalam penelitian ini dibatasi pada : Evaluasi manfaat Program P3DT Tahun 2000, yang meliputi manfaat Program P3DT terhadap aspek – aspek :

- a Manfaat program P3DT terhadap aspek peningkatan penyediaan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- b Manfaat program P3DT terhadap aspek peningkatan kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Grobogan , yang merupakan salah satu Kabupaten penerima Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) Tahun 2000.

D. Variabel Penelitian / Fenomena yang diamati

Adalah Evaluasi program P3DT

1. Klasifikasi Variabel

Variabel Penelitian adalah Fenomena Manfaat Program P3DT.

dengan indikator :

- a Tingkat penyediaan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi
- b Tingkat kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan

2. Definisi Konseptual

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Masukan (*Inputs*)

indikator masukan meliputi : sumber daya, waktu, uang, personil, alat, material yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan dampak .

b. Keluaran (*Outputs*)

Keluaran adalah barang , layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok , yang dihasilkan baik fisik maupun non fisik

c. Hasil (*out comes*)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka pendek dan menengah atau efek tidak langsung

d. Manfaat (*benefits*)

Manfaat adalah yang diperoleh dari indikator hasil , khususnya dalam jangka menengah dan panjang . Indikator ini terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan program

3. Definisi Operasional

Indikator ini terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

a. Masukan (*inputs*)

- 1) Metodologi
- 2) Kesesuaian jadwal
- 3) Tenaga Kerja
- 4) Aktivitas Tim Koordinasi Kabupaten
- 5) Aktivitas Konsultan
- 6) Aktivitas Tim pelaksana Desa (LKMD)

b. Keluaran (*Outputs*)

- 1) Kuantitas hasil hasil program
- 2) Kualitas hasil program
- 3) Kesesuaian usulan rencana

c. Hasil (*Outcomes*)

- 1) Penciptaan lapangan kerja

- 2) Cakupan wilayah dan sasaran program
- 3) Pengembangan wilayah / pengurangan isolasi daerah
- 4) Kelancaran arus barang, jasa dan manusia
- 5) Tingkat Kemampuan kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan tindak lanjut program
- 6) Partisipasi pemuda, wanita dan penduduk miskin

d. Manfaat (*Benefits*)

- 1) Pendukung kegiatan ekonomi, terhadap penciptaan tenaga kerja, penebangan usaha, dan peningkatan pendapatan
- 2) Pendukung kegiatan sosial terhadap kelancaran perjalanan anak sekolah, saling kunjung antar warga.
- 3) Kemampuan Pemeliharaan tindak lanjut program
- 4) Meningkatkan kemampuan peran /partisipasi Desa dan masyarakat dalam pembangunan
- 5) Meningkatkan kemampuan dalam pemeliharaan pembangunan
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan

E. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek dimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini sebagai sumber data primer dapat diperinci sebagai berikut :

VARIABEL	SUMBER DATA
Masukan (Input)	Pimpro, Bappeda
Keluaran (Output)	Pimpro, Bappeda
Hasil (Outcome)	Masyarakat, Aparat Desa
Manfaat (Benefit)	Masyarakat, Aparat Desa

Dalam penelitian ini sumber data untuk variabel masukan dan keluaran dari Tim Koordinasi Kabupaten yaitu Bappeda dan Pimpro DPU Kabupaten, Sedang hasil dan manfaat dengan sumber data dari Masyarakat dan Aparat desa

Atau dilakukan melalui pengambilan sampel secara gugus bertahap dengan sistem Random berstruktur. Kerangka sampel dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut :

TABEL III.1

Daftar nama desa dan jumlah pekerja penerima P3DT Tahun 2000
di Kabupaten Grobogan

NO	Kecamatan	Desa	Pekerja	
			(Orang)	%
1	Brati	Jangkungharjo	1,562	11.79
2	Tawangharjo	Plosorejo	902	6.81
3	Grobogan	Rejosari	793	5.98
4	Purwodadi	Nglobar	740	5.58
5	Wirosari	Tambahrejo	721	5.44
6	Karangrayung	Jetis	719	5.42
7	Tawangharjo	Tarub	690	5.21
8	Purwodadi	Warukaranganyar	689	5.20
9	Grobogan	Putatsari	615	4.64
10	Geyer	Geyer	603	4.55
11	Wirosari	Kalirejo	575	4.34
12	Brati	Lemah Putih	460	3.47
13	Purwodadi	Pulorejo	443	3.34
14	Tawangharjo	Pojok	408	3.08
15	Ngaringan	Ngarap-arap	365	2.75
16	Brati	Tegal Sumur	361	2.72
17	Ngaringan	Ngaringan	335	2.53
18	Tanggungharjo	Ngambakrejo	299	2.26
19	Godong	Kopek	245	1.85
20	Grobogan	Lebeng Jumuk	238	1.80
21	Klambu	Selolari	211	1.59
22	Godong	Anggaswangi	195	1.47
23	Godong	Klompok	191	1.44
24	Ngaringan	Belor	188	1.42
25	Wirosari	Dapurno	162	1.22
26	Karangrayung	Parakan	150	1.13
27	Wirosari	Karangasem	136	1.03
28	Tegowanu	Kebon Agung	130	0.98
29	Tanggungharjo	Kapung	75	0.57
30	Karangrayung	Temurejo	53	0.40
Jumlah			13,254	100

Dari 30 Desa penerima P3DT Tahun 2000 di Kabupaten Grobogan tersebut diambil 3 desa atau 10% dengan cara scoring dari jumlah tenaga kerja /KK. Score tinggi 603 – 1.562 Orang/KK , Score sedang 238 – 575 Orang / KK dan score rendah 150 – 211 orang / KK . Berdasarkan score tinggi, sedang dan rendah tersebut diundi sehingga terdapat 3 desa yang menjadi obyek penelitian

Hasil dari undian untuk menentukan nama 3 desa dan jumlah sampel adalah pada Tabel III.2 sebagai berikut :

TABEL III.2
NAMA DESA DAN JUMLAH SAMPEL PENELITIAN

No	Klp Elemen penelitian	Populasi (KK)	% pengambilan sampel (5%)	Sampel (KK)
1	Desa Geyer Kec. Geyer	603	5	30
2	Desa Ngembakrejo Kec. Tanggungharjo	299	5	15
3	Desa Klampok Kec. Godong	191	5	10
	Jumlah	1.093	5	55

Besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini 55 KK (responden). Cara untuk menentukan sampel sebesar 55 KK, adalah dengan cara ordinal / bilangan kelipatan , yang langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a. Membuat daftar nama KK dari 3 desa yang menjadi sampel penelitian, diurutkan nomor 1 sampai dengan 1.093 .
- b. Menentukan bilangan kelipatan dengan rumus :

$$Bk = \frac{N}{S} = \frac{1.093}{55} = 20$$

- c. Menentukan sampel pertama dengan cara undian, Misal undian pertama jatuh pada no 3, maka populasi no 3 yang dijadikan responden pertama (1)
- d. Sedangkan untuk menentukan responden berikutnya (ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya) adalah dengan menambah nomor responden pertama (3) tersebut dengan Bk (20) .

Misal : Sampel 1 (R1) adalah nomor urut 3, maka urutan responden (sampel) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$R1 = 3$$

$$R2 = 3 + 1 Bk = 3 + 1 (20) = 23$$

$$R3 = 3 + 2 Bk = 3 + 2 (20) = 43$$

$$R4 = 3 + 3 Bk = 3 + 3 (20) = 63$$

Dan seterusnya.

$$R55 = 3 + 55 Bk = 3 + 55 (20) = 1.093$$

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah brosur-brosur, buku-buku, okumen-dokumen dan lain-lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini, adalah Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Laporan Pimpinan Proyek (Pimpro) DPU Kabupaten , Laporan Bappeda, dan Laporan Konsultan..

F. Tehnik pengambilan sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik random sampling yaitu semua individu dari populasi diberi kesempatan yang sama menjadi anggota sampel. Daftar pengambilannya adalah seluruh populasi dengan berdasarkan nomor urut , kemudian cara pemilihannya adalah dengan cara undian.

H. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Field Research*

a. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung berdasarkan pertanyaan yang telah disediakan dengan Masyarakat penerima dampak dan Aparat Desa.

b. *Interview Guide* , yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan dengan menggunakan daftar pedoman pertanyaan

c. *Questionnaire*

Pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab, agar dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Observasi, adalah pengumpulan data dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti.
3. Studi Dokumentasi, adalah pengumpulan data dengan membaca buku-buku literatur, dengan maksud untuk mendapatkan teori-teori dan bahan – bahan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini..
4. Skala pengukuran

Pembuatan skala pengukuran adalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian , karena data yang diperoleh di lapangan masih bersifat kualitatif. Skala pengukuran data bertujuan untuk mengukur variabel-variabel yang telah dioperasionalkan melalui indikatornya masing-masing, dan untuk memperoleh datanya , maka indikator tersebut dijabarkan kedalam beberapa bentuk pertanyaan yang masing-masing sudah ada alternatif jawabannya , terkecuali untuk pertanyaan yang bersifat terbuka , sehingga responden diberi kebebasan untuk menjawab sesuai aspirasinya berkaitan dengan masalah penelitian ini

Dalam pertanyaan diberi alternatif jawaban dengan empat kategori secara urut dalam bentuk urutan naik dari yang berkategori tinggi ke berkategori rendah) dimana masing-masing kategori diberi score atau nilai sesuai bobotnya. Jadi pengukurannya adalah menunjukkan angka pada suatu variabel . Prosedur pengukuran dan pemberian angka diharapkan ada kesesuaian dengan realita

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang penulis gunakan adalah skala ordinal . dengan cara sebagai berikut :

- Mengukur indikator masing-masing variabel yang telah dijabarkan kedalam item-item bentuk pertanyaan
- Pertanyaan tersebut dengan jawaban yang telah ditentukan dalam bentuk menurun , sehingga jawaban yang diperoleh akan menunjukkan jenjang urutan.

Pertanyaan disediakan (4) alternatif jawaban sebagai berikut :

- kategori jawaban sangat sesuai /sangat tinggi diberi nilai 4
- kategori jawaban cukup sesuai/tinggi diberi nilai 3
- kategori jawaban sesuai/sedang diberi nilai 2
- kategori jawaban tidak sesuai/ rendah diberi nilai 1

Sedangkan persentase (%) yang digunakan dengan cara pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Score yang dicapai}}{\text{Score yang diharapkan}} \times 100 \%$$

Hasil persentase dapat digolongkan kedalam nilai interval dari 0,00% - 100%

76,00 % - 100 % dikategorikan sangat tinggi

51,00 % - 75,00 % dikategorikan tinggi

26,00 % - 50,00 % dikategorikan sedang

0,00% - 25,00 % dikategorikan rendah

I. Teknik Analisis Data

1. Pengolahan data kuantitatif

Adapun langkah - langkah dalam pengolahan data kuantitatif adalah sebagai berikut :

a. *Editing*

Yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan meneliti atau memeriksa kembali jawaban yang telah diberikan responden itu apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan apa belum.

b. *Coding*

Yaitu suatu pekerjaan yang dapat memberikan tanda atau kode tertentu atau jawaban yang telah diberikan oleh responden menurut kategori-kategori tertentu dengan tujuan mempermudah penganalisaan.

c. *Tabulating*

Yaitu pengelompokkan data dalam tabel kerja dan mengatur angka-angka sedemikian rupa sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori.

2. Pengolahan data kualitatif dilakukan melalui Analisa data yang digunakan untuk mengolah data yang dipergunakan untuk mengolah data yang sifatnya nyata dalam bentuk angka-angka.

J. Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika pelaporan penelitian ini adalah :

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang, Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian .

BAB II : Bab ini berisikan Landasan Teori / Pengkajian Teoritis dan Pembahasan Penelitian yang relevan

BAB III : Bab ini berisi Rancangan Penelitian Perspektif Pendekatan Penelitian, Ruang lingkup Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian Variabel Penelitian. Klasifikasi variabel Definisi Operasional (variabel) Jenis dan sumber data, Instrumen penelitian., Populasi dan Teknik pengambilan sampel., Teknik Pengumpulan Data., Teknik analisis Data

BAB IV : Berisi analisis masukan (*inputs*), Keluaran (*Output*), Hasil (*outcomes*) Manfaat (*benefits*)

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Evaluasi terhadap kinerja Program P3DT ini menggunakan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefits*). Analisis evaluasi kinerja ini akan lebih difokuskan kepada indikator manfaat pada tujuan P3DT terutama manfaat pembangunan prasarana sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi dan peningkatan kemampuan kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan.

A. Masukan (*Inputs*)

Masukan yang diukur sebagai kinerja proyek dalam penelitian ini adalah metodologi, jumlah dana, kesesuaian jadwal, jumlah tenaga kerja antara rencana dan realisasi proyek, yang dipakai untuk menghasilkan keluaran.

1. Metodologi

Tim Koordinasi P3DT Pusat dalam hal ini Bappenas dan Ditjen Bangda Depdagri dan Otonomi Daerah, telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan program P3DT, sebagai panduan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pelatihan untuk Tim Koordinasi P3DT Kabupaten, LKMD dan Konsultan. Buku petunjuk pelaksanaan

ersebut terdiri dari Petunjuk Pelaksanaan Program P3DT secara umum, Buku Petunjuk Teknis yang meliputi petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, petunjuk teknis Pembangunan air bersih, saluran irigasi, Pembangunan Pasar desa, Pembangunan Tempat pelelangan ikan, pembangunan Gudang, penggilingan padi dan lantai jemur padi, dan pembangunan terminal desa.

Buku panduan tersebut pada waktu persiapan telah dibagikan dan disosialisasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Pusat melalui rapat koordinasi maupun pelatihan kepada Tim Koordinasi P3DT Kabupaten, dalam hal ini Bappeda, DPU Kabupaten (Pimpro), Kantor Pembinaan Masyarakat Desa (PMD), DPRD Kabupaten, Camat dan Kasi PMD Kecamatan, LKMD dan Konsultan.

2. Jumlah dana.

Jumlah dana yang telah disediakan Program P3DT di kabupaten Grobogan tahun 2000 sebesar Rp 5 milyar. Pada akhir bulan Desember 2000 secara keseluruhan dapat terserap 100%. Kesesuaian antara rencana dan realisasi tersebut adanya persiapan perencanaan yang baik yang sudah dimulai pada bulan Januari 2000. Waktu persiapan perencanaan cukup panjang yang diawali seleksi desa calon penerima program, yang mewajibkan setiap desa membuat proposal usulan yang diverifikasi oleh Konsultan Manajemen Teknik (KMT) Kabupaten dan Konsultan Pendamping (KP).

Pemanfaatan dana program P3DT pengelolaannya dibagi menjadi 2 (dua) jenis kegiatan yaitu :

- 1) Bantuan langsung ke 30 desa dengan dana sebesar Rp 4,5 milyar, terdiri dari biaya umum untuk administrasi desa sebesar Rp 208,06 juta (4,16%) dan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik sebesar Rp 4,29 milyar (90%) . Pembangunan prasarana fisik tersebut antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, Talud, pasar, air bersih dan administrasi umum . Besarnya Jumlah dana setiap desa yang terendah Rp 120 juta dan yang tertinggi Rp 192 juta
- 2) Biaya Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) di Kabupaten sebesar Rp 450 juta, yang berasal dari sumber dana APBN Rp 225 juta dan APBD Kabupaten Grobogan sebesar Rp 225 juta untuk membiayai pelatihan, fasilitasi dan pembinaan Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan . Unsur Tim Pembina tersebut terdiri dari Bappeda Kabupaten, DPU Kabupaten, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Aparat Kecamatan dan Dinas-Instansi yang terkait Pembangunan desa. (Tabel VI-1)

TABEL IV – 1
JUMLAH DANA DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PROGRAM P3DT TAHUN 2000
KABUPATEN GROBOGAN

NO	KECAMATAN	DESA	DANA P3DT (RUPIAH)					REALISASI	
			DANA DI DESA			DANA PAP KAB	JUMLAH TOTAL	FISIK %	KEU %
			DANA UMUM	PRASARANA FISIK	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Karangrayung	Parakan	8,359	158,641	167,000		167,000	100.00	100.00
2	Karangrayung	Temurejo	5,556	119,444	125,000		125,000	100.00	100.00
3	Tegowanu	Kebon Agung	7,879	154,121	162,000		162,000	100.00	100.00
4	Tanggunganharjo	Ngambakrejo	6,001	115,500	121,500		121,500	100.00	100.00
5	Tanggunganharjo	Kapung	6,188	151,812	158,000		158,000	100.00	100.00
6	Karangrayung	Jetis	6,250	143,750	150,000		150,000	100.00	100.00
7	Geyer	Geyer	8,233	183,767	192,000		192,000	100.00	100.00
8	Grobogan	Rejosari	5,952	118,048	124,000		124,000	100.00	100.00
9	Purwodadi	Warukaranganyar	6,768	141,232	148,000		148,000	100.00	100.00
10	Purwodadi	Nglobar	6,252	127,748	134,000		134,000	100.00	100.00
11	Ngaringan	Ngaringan	6,300	120,700	127,000		127,000	100.00	100.00
12	Ngaringan	Ngarap-arap	8,306	168,194	176,500		176,500	100.00	100.00
13	Ngaringan	Belor	7,821	168,179	176,000		176,000	100.00	100.00
14	Wirosari	Dapurno	7,000	143,000	150,000		150,000	100.00	100.00
15	Tawangharjo	Plosorejo	6,493	124,508	131,000		131,000	100.00	100.00
16	Wirosari	Tambahrejo	7,646	154,354	162,000		162,000	100.00	100.00
17	Wirosari	Kalirejo	7,578	144,172	151,750		151,750	100.00	100.00
18	Wirosari	Karangasem	7,161	142,839	150,000		150,000	100.00	100.00
19	Tawangharjo	Tarub	7,277	142,723	150,000		150,000	100.00	100.00
20	Tawangharjo	Pojok	7,516	152,734	160,250		160,250	100.00	100.00
21	Grobogan	Putatsari	6,023	143,977	150,000		150,000	100.00	100.00
22	Grobogan	Lebeng Jumuk	6,000	143,000	149,000		149,000	100.00	100.00
23	Purwodadi	Pulorejo	6,000	144,000	150,000		150,000	100.00	100.00
24	Brati	Jangkunharjo	7,500	177,500	185,000		185,000	100.00	100.00
25	Brati	Lemah Putih	6,000	124,000	130,000		130,000	100.00	100.00
26	Brati	Tegal Sumur	6,000	114,000	120,000		120,000	100.00	100.00
27	Klambu	Selojari	7,500	142,500	150,000		150,000	100.00	100.00
28	Godong	Anggaswangi	7,500	142,500	150,000		150,000	100.00	100.00
29	Godong	Klompok	7,500	142,500	150,000		150,000	100.00	100.00
30	Godong	Kopek	7,500	142,500	150,000		150,000	100.00	100.00
	Jumlah		208,057	4,291,943	4,500,000	450,000	4,950,000	100.00	100.00
		Persentase	4.16	85.84	90.00	10.00	100		

Sumber : Bappeda Kab. Grobogan, Tahun 2000, diolah

3. Kesesuaian jadwal

Kegiatan persiapan dan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Program P3DT telah dilaksanakan oleh Kabupaten Grobogan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Tim Koordinasi Pusat (Tabel IV-2).

Pelaksanaan fisik proyek di setiap desa dapat diselesaikan tepat waktu. Pekerjaan fisik di setiap desa dikerjakan rata-rata dalam waktu 73 hari sampai dengan 120 hari kerja. Dimulai tanggal 1 September 2000 dan secara keseluruhan dapat diselesaikan 100% pada tanggal 20 Desember 2000. Dengan ketepatan waktu pelaksanaan, hasil pembangunan prasarana sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan sosial dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. (Tabel IV-3)

Ketepatan waktu pelaksanaan tersebut, antara lain adanya dukungan Tim Pelaksana LKMD bersama Konsultan Pendamping dibantu oleh Kasie PMD Kecamatan membuat rencana kerja detil pelaksanaan proyek berdasarkan jadwal pelaksanaan dalam dokumen SPPB, sebagai acuan mandor dan pekerja dilapangan. Selama pelaksanaan Tim Pelaksana LKMD secara rutin setiap minggu atau dua minggu mengadakan rapat kerja untuk melakukan evaluasi hasil kerja, membuat rencana kerja, membuat rencana penggunaan dana dan laporan sertifikasi.

Tahun Anggaran 2000 merupakan tahun transisi perubahan waktu pelaksanaan program / proyek secara Nasional. Perubahan waktu dimulainya tahun anggaran dari 1 April sampai dengan 31 Maret, menjadi 1 Januari sampai dengan 31 Desember, berdampak pada lambatnya turunnya DADPD dari Pusat ke Kabupaten. Untuk mengatasinya dana untuk kegiatan persiapan proyek menggunakan dana Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.

TABEL IV-2
JADWAL KEGIATAN PROGRAM P3DT POLA SWAKELOLA LKMD
PEMBANGUNAN PRASARANA PENDUKUNG DESA TERTINGGAL (P3DT)
DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2000

NO	KEGIATAN	TANGGAL/BULAN
1	2	3
I	PERSIAPAN DAN PERENCANAAN	
1	Deseminasi P3DT Tingkat Kabupaten	28 – 29 Pebruari
2	Penentuan desa yang diundang membuat proposal	1 – 5 Maret
3	Pelaksanaan Sosialisasi	5 Maret
4	Pembuatan Proposal oleh Desa	16-31 Maret
5	Penerimaan Proposal oleh Kabupaten	1 April
6	Verifikasi dokumen proposal	1-10 April
7	Penetapan daftar prioritas desa	10 April
8	Verifikasi lapangan	11-20 April
9	Workshop Orientasi Konsultan pendamping	29 Mei-11 Juni
10	Survei, design, RAB, jadwal pelaksanaan	13 Juni – 10 Agust
11	Penyampaian dan persetujuan SPPB	12 Agustus
12	Penentuan Desa penerima P3DT	14 Agustus
IV	PELAKSANAAN	
1	Orientasi persiapan pelaksanaan di Kabupaten	15 Agustus
2	Persiapan di desa , penyiapan Tim pelaksanaan	1 – 15 Agustus
3	Pelatihan Tim pelaksana : Adm, keuangan dan manaje men	16 –20 Agustus
4	Pengajuan dana awal ke KPKN	15 Agustus
5	Pengambilan dana awal ke BRI	18 Agustus
6	Persiapan konstruksi, proses pengadaan material	15 Agustus
7	Pelaksanaan konstruksi	25 Agust-10 Des
8	Pelaksanaan kegiatan pra audit di desa	30% dan 80%
9	Workshop evaluasi dan pemeliharaan	20-24 Nopember
10	Pembuatan rencana pemeliharaan dan pelatihan	1-15 Desember
11	Pembuatan dokumen penyelesaian	16-31 Desember
12	Pelaporan bulanan	25 – 5 (Bulanan)
III	PENGENDALIAN , MONITORING DAN EVALUASI	
1	Deseminasi Tim koordinasi P3DT Kabupaten	31 Mei – 8 Juni
2	Workshop evaluasi kinerja Pemberdayaan masyarakat	26 – 30 Juni
3	Workshop Pimpro P3DT	10-14 Juli
4	Deseminasi dan pelatihan TOT PPKMI (Bappeda dan PMD)	24-28 Juli
5	Pelatihan KPM P3DT untuk Kasi PMD Kec.	7-11 Agustus
6	Pelatihan PP-KMI P3DT untuk Camat	28-31 Agustus
7	Pembinaan , monitoring, dan pelaporan	April-Desember
8	Rapat evaluasi triwulanan Tim Koordinasi P3DT	Juli,Okt,Des

TABEL IV-3
JADWAL PELAKSANAAN FISIK PROGRAM P3DT TAHUN 2000
DI KABUPATEN GROBOGAN

NO	KECAMATAN	DESA	KUMULATIF HARI KERJA	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	TANGGAL SELESAI PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
1	Karangrayung	Parakan	110	1 September 2000	20 Desember 2000
2	Karangrayung	Temurejo	110	1 September 2000	20 Desember 2000
3	Tegowanu	Kebon Agung	110	1 September 2000	20 Desember 2000
4	Tanggungharjo	Ngambakrejo	110	1 September 2000	20 Desember 2000
5	Tanggungharjo	Kapung	110	1 September 2000	20 Desember 2000
6	Karangrayung	Jetis	98	1 September 2000	7 Desember 2000
7	Geyer	Geyer	105	1 September 2000	14 Desember 2000
8	Grobogan	Rejosari	96	1 September 2000	5 Desember 2000
9	Purwodadi	Warukaranganyar	97	1 September 2000	6 Desember 2000
10	Purwodadi	Nglobar	103	1 September 2000	12 Desember 2000
11	Ngaringan	Ngaringan	120	1 September 2000	20 Desember 2000
12	Ngaringan	Ngarap-arap	120	1 September 2000	20 Desember 2000
13	Ngaringan	Belor	120	1 September 2000	20 Desember 2000
14	Wirosari	Dapurno	120	1 September 2000	20 Desember 2000
15	Tawangharjo	Plosorejo	120	1 September 2000	20 Desember 2000
16	Wirosari	Tambahrejo	84	7 September 2000	30 Nopember 2000
17	Wirosari	Kalirejo	85	14 September 2000	4 Desember 2000
18	Wirosari	Karangasem	97	18 September 2000	12 Desember 2000
19	Tawangharjo	Tarub	83	12 September 2000	4 Desember 2000
20	Tawangharjo	Pojok	85	11 September 2000	7 Desember 2000
21	Grobogan	Putatsari	87	5 September 2000	30 Nopember 2000
22	Grobogan	Lebeng Jumuk	91	6 September 2000	5 Desember 2000
23	Purwodadi	Pulorejo	84	8 September 2000	30 Nopember 2000
24	Brati	Jangkungharjo	84	8 September 2000	30 Nopember 2000
25	Brati	Lemah Putih	83	9 September 2000	30 Nopember 2000
26	Brati	Tegal Sumur	84	12 September 2000	4 Desember 2000
27	Klambu	Selojari	80	13 September 2000	30 Nopember 2000
28	Godong	Anggaswangi	73	20 September 2000	30 Nopember 2000
29	Godong	Klampok	81	19 September 2000	6 Desember 2000
30	Godong	Kopek	73	20 September 2000	30 Nopember 2000
Jumlah			2.903	0	
Persentase					

Sumber : Bappeda Kab. Grobogan, Tahun 2000

4. Tenaga Kerja

Sumber daya manusia sebagai pendukung terlaksananya pembangunan Program P3DT adalah tersedianya tenaga kerja sebagai pelaksana program, disamping adanya aktivitas Tim Koordinasi P3DT Kabupaten, Konsultan Manajemen Teknik (KMT), dan Konsultan Pendamping (KP)

Berdasarkan wawancara dengan Tim Koordinasi P3DT (Bappeda) Kabupaten Grobogan tidak mengalami kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja, baik tenaga kerja tukang, mandor dan tenaga kerja pelaksana. Rencana penyerapan tenaga kerja yang telah disusun sebelumnya dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengatasi banyaknya tenaga kerja yang berpartisipasi dalam pelaksanaan fisik, tenaga kerja yang tersedia dimobilisasi dengan sistem bergilir dalam melakukan pekerjaan proyek. Jumlah pekerja biasa, tukang dan mandor yang terserap dalam pelaksanaan Program P3DT di 30 Desa sebanyak 13.254 orang, yang terdiri dari Tenaga kerja wanita sebanyak 2.768 (20,88%), pemuda 3.087 (23,29%), dan penduduk miskin 9.748 orang (73,55%). Hal ini menunjukkan arah program sangat sesuai sasaran karena dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan peningkatkan partisipasi perempuan. (IV – 4)

UPT-PUSAT-INDIP

TABEL IV-4
REALISASI PENYERAPAN TENAGA KERJA PELAKSANAAN P3DT TAHUN 2000
KABUPATEN GROBOGAN

NO	KECAMATAN	DESA	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (Orang)	Pemuda		Miskin	
			(Orang)	(%)	(Orang)	(%)		(Orang)	(%)	(Orang)	(%)
1	2	3	4		5		6	7		8	
1	Karangrayung	Parakan	90	60,00	60	40,00	150	21	14,00	150	100,00
2	Karangrayung	Temurejo	40	75,47	13	24,53	53	5	9,43	53	100,00
3	Tegowanu	Kebon Agung	97	74,62	33	25,38	130	33	25,00	130	100,00
4	Tanggungharjo	Ngambakrejo	130	43,48	169	56,52	299	63	21,07	299	100,00
5	Tanggungharjo	Kapung	60	80,00	15	20,00	75	13	17,33	75	100,00
6	Karangrayung	Jetis	674	93,74	45	6,26	719	76	10,57	669	93,05
7	Geyer	Geyer	451	74,79	152	25,21	603	164	27,20	603	100,00
8	Grobogan	Rejosari	541	68,22	252	31,78	793	184	23,20	690	87,01
9	Purwodadi	Warukaranganyar	674	97,82	15	2,18	689	56	8,13	669	97,10
10	Purwodadi	Nglobar	675	91,22	65	8,78	740	368	49,73	709	95,81
11	Ngaringan	Ngaringan	335	100,00	0	0,00	335	112	33,43	175	52,24
12	Ngaringan	Ngarap-arap	360	98,63	5	1,37	365	20	5,48	200	54,79
13	Ngaringan	Belor	188	100,00	0	0,00	188	81	43,09	180	95,74
14	Wirosari	Dapurno	139	85,80	23	14,20	162	56	34,57	162	100,00
15	Tawangharjo	Plosorejo	690	76,50	212	23,50	902	110	12,20	900	99,78
16	Wirosari	Tambahrejo	711	98,61	10	1,39	721	266	36,89	427	59,22
17	Wirosari	Kalirejo	503	87,48	72	12,52	575	91	15,83	352	61,22
18	Wirosari	Karangasem	130	95,59	6	4,41	136	25	18,38	103	75,74
19	Tawangharjo	Tarub	670	97,10	20	2,90	690	266	38,55	427	61,88
20	Tawangharjo	Pojok	344	84,31	64	15,69	408	33	8,09	391	95,83
21	Grobogan	Putatsari	584	94,96	31	5,04	615	87	14,15	584	95,00
22	Grobogan	Lebeng Jumuk	193	81,09	45	18,91	238	90	37,82	167	70,00
23	Purwodadi	Pulorejo	290	65,46	153	34,54	443	32	7,22	266	60,00
24	Brati	Jangkungharjo	779	49,87	783	50,13	1.562	456	29,19	297	19,00
25	Brati	Lemah Putih	351	76,30	109	23,70	460	159	34,57	414	90,00
26	Brati	Tegal Sumur	304	84,21	57	15,79	361	86	23,82	158	43,77
27	Klambu	Selojari	109	51,66	102	48,34	211	14	6,64	104	49,29
28	Godong	Anggaswangi	108	55,38	87	44,62	195	38	19,49	146	74,87
29	Godong	Klampok	126	65,97	65	34,03	191	48	25,13	65	34,03
30	Godong	Kopek	140	57,14	105	42,86	245	34	13,88	184	75,10
Jumlah			10.486	2.365	2.768	20,88	13.254	3.087	664	9.748	2.340
Persentase			79,12	79,12	20,88	20,88	100	23,29	664	73,55	

Sumber : Bappeda Kab. Grobogan, Tahun 2000, diolah

5. Aktivitas Tim Koordinasi P3DT Kabupaten

Sesuai Wawancara dengan Bappeda Kabupaten Grobogan, Tim Koordinasi P3DT Kabupaten telah dibentuk dengan SK Bupati yang susunan anggota sebagai berikut : Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dengan anggota terdiri dari Instansi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) , Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Bagian Penyusunan Program Setda, Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara (KPKN) , serta Camat (Kec.lokasi proyek).

Aktivitas Tim Koordinasi P3DT Kabupaten pada waktu persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan atau tindak lanjut program adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada waktu persiapan Tim Koordinasi P3DT Kabupaten telah melakukan kegiatan mengikuti diseminasi P3DT di Tingkat Pusat (Ditjen Bangda Depdagri / Bappenas) untuk memperoleh penjelasan mengenai filosofi dasar P3DT, maksud dan tujuan, pendekatan yang diambil, dan mekanisme pelaksanaan.

Melakukan penyusunan rencana kerja/kegiatan pembinaan dan administrasi-proyek, dan menentukan calon desa-desa yang akan diundang sosialisasi P3DT berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.

Mengadakan sosialisasi kepada calon desa penerima, aparat Kecamatan dan anggota DPRD Kabupaten, mengenai kebijaksanaan nasional tentang bantuan P3DT, meliputi filosofi dasar P3DT, maksud dan tujuan, pendekatan, mekanisme pelaksanaan dan prosedur pembuatan proposal dan penilaian.

Tim Koordinasi dibantu Konsultan Manajemen Teknik (KMT) dan Konsultan Pendamping (KP) melakukan penilaian, verifikasi, seleksi, dan penetapan desa penerima bantuan serta pembentukan cluster.

Memantau pelaksanaan proses perencanaan prasarana di Desa, untuk menjamin agar pilihan prasarana yang diusulkan tersebut merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Menginformasikan dan melakukan sinkronisasi pembangunan prasarana yang bersumber dari program lain yang akan dilaksanakan pada waktu bersamaan, agar tidak terjadi tumpang tindih.

Memberikan masukan kepada Bupati mengenai lokasi dan nama desa yang akan menerima P3DT sesuai dengan jumlah dana yang telah dialokasikan untuk selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Nama Desa Penerima Bantuan P3DT Pola Swakelola.

Menyebarkan informasi P3DT melalui berbagai media massa maupun forum-forum yang relevan, dan memfasilitasi proses pembentukan Komite Pemantau Pemberdayaan Masyarakat (KPPM)

DPRD dan Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat (SPM) di desa-desa.

Mempersiapkan mekanisme pengaduan P3DT dan instrumen yang diperlukan di tingkat Kabupaten, dan melaksanakan dialogis interaktif dengan Forum Lintas Pelaku – JPS dan KPPM-DPRD mengenai pemberdayaan masyarakat Program P3DT.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan program, Tim Koordinasi P3DT Kabupaten telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Tim Koordinasi Kabupaten dengan dibantu KMT dan KP mengadakan orientasi Bantuan P3DT kepada aparat Kecamatan, Kepala Desa dan LKMD, dan melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai Bantuan P3DT di Desa kepada masyarakat desa, serta memantau perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, administrasi dan keuangan proyek.

Melaksanakan kegiatan pemberdayaan aparat baik di lingkungan internal, seperti pelatihan KasiPMD, asisten Pimpro, LKMD, maupun kepada pihak external, seperti kepada anggota DPRD melalui pengembangan Komite Pemantauan Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) dan Forum Lintas Pelaku serta meningkatkan mekanisme komunikasi yang informatif, dialogis dan konstruktif dengan berbagai pihak dan pers.

Memantau pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh Camat/Kasie PMD melalui forum-forum Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat (SPM).

Memeriksa laporan dari Pemimpin proyek tentang perkembangan pelaksanaan pekerjaan serta memberikan masukan kepada Tim Koordinasi P3DT Propinsi untuk penyempurnaan kebijaksanaan pelaksanaan P3DT.

Menyelesaikan masalah yang memerlukan penanganan. Tim Koordinasi P3DT Kabupaten dan melaporkan permasalahan yang memerlukan penanganan tindak lanjut Tim Koordinasi P3DT Propinsi.

Memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi agar sasaran pekerjaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menyusun laporan yang berupa laporan berkala maupun laporan insidental perkembangan pelaksanaan proyek yang disampaikan ke Tim Koordinasi P3DT Propinsi dengan ditembuskan kepada Bupati.

Menyusun umpan balik kepada Pemimpin Proyek untuk ditindak lanjuti, dengan tembusan kepada Bupati sebagai laporan dan memantau kinerja kegiatan konsultan yang ada di daerah.

c. Tahap Pemanfaatan

Pada tahap pemanfaatan Tim Koordinasi Kabupaten telah

melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

Mengupayakan dukungan sumber dana untuk terlaksananya kegiatan operasional, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut prasarana yang telah dibangun agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan, baik langsung dari Daerah Kabupaten maupun dari Propinsi.

6. Aktivitas Konsultan Manajemen Teknik (KMT)

Di kabupaten Grobogan telah di tempatkan 1 (satu) orang Konsultan Manajemen Teknik (KMT) yang secara umum mempunyai tugas menjaga agar proses pelaksanaan P3DT dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip P3DT, yang meliputi : pemberdayaan masyarakat dan aparat; partisipasi; interaksi; transparansi; kualitas konstruksi, administrasi dan keuangan proyek; alih teknologi dan pemeliharaan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim KMT bertanggung jawab kepada Asisten Team Leader KMT dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi P3DT Kabupaten, Pimpro P3DT dan (koordinator KP), Tim KMT akan berkantor di Kabupaten.

Secara umum Konsultan Manajemen Teknik (KMT) telah melakukan kegiatan pembinaan secara teknis dan administratif antara lain :

KMT telah membantu Tim Koordinasi P3DT Kabupaten untuk menjelaskan tentang filosofi dasar, maksud dan tujuan, sasaran, dan peraturan bantuan P3DT dalam sosialisasi pemilihan desa kepada calon-calon desa pembuat usulan, dan membantu proses penilaian usulan desa, menetapkan desa serta dalam pembentukan cluster.

Memantau dan melaporkan proses pelaksanaan P3DT, mulai dari usulan desa, verifikasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan dokumentasi.

Membantu Tim Koordinasi P3DT Kabupaten dalam menyelenggarakan orientasi Kabupaten kepada aparat Kecamatan wakil desa dan LKMD, dan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan manajemen interaksi.

Memberi saran penyempurnaan terhadap prosedur dan standar dan menyampaikan permasalahan yang perlu ditindak lanjuti Sekretariat P3DT.

Membantu kegiatan pelatihan bagi Konsultan Pendamping dan bertanggung jawab atas materi pelatihan.

Membantu Tim Koordinasi P3DT Kabupaten dalam melaksanakan koordinasi dengan desa, Kecamatan, PMD, Bank penyalur, dan KPKN.

Mengaudit laporan kemajuan fisik dan keuangan oleh konsultan pendamping dan LKMD, dan memberikan umpan balik, serta membuat laporan bulanan untuk Tim Koordinasi P3DT Kabupaten, tembusan ATL-KMT dan Manajer Kontrak KMT.

Mengkoordinasi pelaksanaan Pra Audit pekerjaan LKMD pada saat kemajuan pekerjaan mencapai 30% dan 80% agar dapat dicapai validitas penilaian dan hasilnya dapat dijadikan patokan.

Membantu Tim Koordinasi P3DT Kabupaten dalam melaksanakan evaluasi manfaat, dan menghandiri rapat triwulan Konsultan Pendamping (KP) dan rapat triwulan Konsultan Manajemen Teknik (KMT).

Secara khusus KMT telah melakukan kegiatan membantu Tim Koordinasi P3DT Kabupaten antara lain :

Melakukan pengawasan lapangan dan supervisi pelaksanaan kegiatan P3DT, dengan melakukan kunjungan ke desa-desa untuk memeriksa hasil pekerjaan Tim Pelaksana/LKMD dan melakukan bimbingan perbaikan cara kerja LKMD.

Memantau kemajuan pekerjaan baik fisik, keuangan, maupun proses pemberdayaan masyarakat (sarasehan pemberdayaan masyarakat) melalui kunjungan lapangan dan melalui analisis laporan yang disampaikan oleh Konsultan Pendamping.

Membuat catatan hasil pemeriksaan, dan diberikan langsung ke Tim Pelaksana di desa tembusan ke KMT I dan Pimpro sebagai temuan dan masukan.

Mengusulkan kepada Pimpro untuk menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan konstruksi apabila pekerjaan tidak sesuai dengan desain, dengan disertai penjelasan tertulis kepada Konsultan Pendamping :

Menyiapkan rekomendasi penilaian terhadap kinerja Konsultan Pendamping (KP) secara Tim kerja maupun individu dalam 4(empat) aspek kemampuan di lapangan, yaitu : desain dan konstruksi, administrasi LKMD identifikasi dan antisipasi masalah dan kemandirian LKMD untuk disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi P3DT Kabupaten, dengan tembusan kepada ATL-KMT dan koordinator KP.

Memberikan masukan kepada Pimpro tentang : Teknik-teknik pengawasan dan pemeriksaan lapangan; Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan lapangan; Persiapan dan metode pelaksanaan pra audit; Masalah-masalah yang ditemui dilapangan yang belum sesuai dengan aturan P3DT dan alternatif-alternatif penanganannya.

Memberikan masukan-masukan kepada Tim Koordinasi P3DT Kabupaten terhadap masalah-masalah koordinasi lintas sektoral,

kebijakan pelaksanaan dan hal-hal lain yang relevan (misalnya : masalah konflik sosial yang mungkin ditemui)

7. Aktivitas Konsultan Pendamping (KP)

Jumlah Konsultan Pendamping (KP) di Kabupaten Grobogan sebanyak 6 orang, dimana setiap Orang bertugas membantu 5 desa per cluster. KP melaksanakan tugasnya secara tim dengan membentuk Tim Kerja yang terdiri dari 3-4 orang KP dimana seorang Konsultan Pendamping akan bertindak sebagai Ketua Tim yang ditetapkan oleh Team Leader KP (Koordinator KP) dengan memperhatikan kemampuan, kepemimpinan dan kerjasamanya. Semua anggota Tim Kerja KP bertanggung jawab terhadap keberhasilan semua desa-desa diwilayah kerja tim. Setiap kabupaten akan mendapatkan bantuan 2-3 Tim Kerja KP.

Semua Konsultan Pendamping dibimbing dan diawasi oleh satu Tim Konsultan Manajemen Teknik (Tim KMT), terdiri dari 2 orang yang bertugas untuk membantu 2-3 kabupaten .

Konsultan pendamping, berkedudukan di Posko di wilayah kerja; Pada saat pelaksanaan konstruksi berpindah ke lokasi yang berdekatan dengan cluster yang dibawahinya,

Dalam pelaksanaan tugasnya Konsultan Pendamping bertanggung jawab kepada Pimpro P3DT di DPU Kabupaten dan

berkoordinasi dengan Tim Koordinasi P3DT Kabupaten, Tim KMT, dan Tim Leader KP.

Konsultan Pendamping (KP) telah melakukan tugas membantu Pimpro dan LKMD, pada tahap persiapan dan perencanaan; pelatihan; pengawasan dan pemantauan pelaksanaan; dan pelaporan, yang rinci sebagai berikut:

a. Persiapan dan Perencanaan

Pada tahap persiapan dan Perencanaan Konsultan Pendamping (KP) telah melakukan kegiatan antara lain :

Membantu Pimpro dan Tim Koordinasi dalam melaksanakan verifikasi dokumen dan verifikasi teknis di lapangan terhadap usulan yang diajukan desa dengan memperhatikan rencana tata ruang desa;

Membantu Pimpro dan Tim Koordinasi P3DT Kabupaten dalam pembentukan cluster;

Mengumpulkan data umum yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek P3DT, meliputi: ketersediaan bahan dan peralatan, fasilitas angkutan yang ada dan dapat dimanfaatkan, daftar nama pertsonil yuang akan dilibatkan dalam kegiatan bantuan P3DT dan menginventarisasi tenaga terampil yang ada di desa;

Mengawasi proses penyelesaian ganti rugi dan membantu LKMD dalam pelaksanaan survei/pengukuran untuk konstruksi prasarana yang dipilih dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan sumber daya

manusia setempat; serta memperhitungkan dampak pembangunan terhadap lingkungan;

Membantu LKMD dalam membuat desain/gambar rencana konstruksi dan menghitung volume bahan, alat, tenaga, dan biaya untuk tiap prasarana yang disepakati;

Membantu LKMD membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Dokumen Kelengkapan SPPB, Membantu LKMD membuka Rekening LKMD di Bank Pemerintah terdekat; serta ikut menyelenggarakan rapat pada tahap awal untuk Ketua LKMD dan Kepala Pelaksana proyek P3DT.

b. Pelatihan

Pada tahap pelatihan Konsultan Pendamping (KP) perannya sangat besar untuk peningkatan kualitas Sumberdaya manusia di bidang teknis dan administratif antara lain :

Membimbing anggota LKMD dan Masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan survei/pengukuran, dan memberikan pelatihan kepada Tim Pelaksana Desa mengenai kelengkapan administrasi, pelelangan pengadaan bahan, penarikan, pengeluaran dan pencatatan pada Buku Kas Umum, pertanggung jawaban keuangan dan manajemen konstruksi;

Menerangkan desain dan gambar teknis kepada Kepala Kelompok, Mandor dan Kepala Pelaksana;

Memberikan pelatihan khusus (teori dan praktek lapangan) kepada masyarakat sebelum melaksanakan pekerjaan konstruksi;

Membimbing masyarakat mengenai hal-hal teknis yang mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan atau tingkat kemajuan;

Membimbing LKMD dalam menjelaskan mengenai tujuan program, kegiatan, dan kemajuan bantuan P3DT kepada peninjau lapangan;

Melakukan bimbingan kegiatan pemberdayaan, transparansi, dan manajemen interaksi di desa melalui kegiatan Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat (SPM);

Melakukan bimbingan terhadap pengaturan tenaga kerja dan dalam peningkatan produktivitas;

Membimbing Tim Pelaksana dalam kegiatan rapat evaluasi di desa maupun di-cluster;

Memberi bimbingan khusus mengenai pemanfaatan prasarana desa yang telah dibangun; serta mempersiapkan pengorganisasian, rencana operasional, melatih LKMD dalam teknik survei/analisis kebutuhan pemeliharaan dan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang ada.

c. Pengawasan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Konsultan Pendamping telah melakukan pengawasan pelaksanaan antara lain :

Melakukan kunjungan secara rutin ke desa untuk memberikan bimbingan administrasi, keuangan, manajemen konstruksi dan teknis pelaksanaan;

Memeriksa Rencana Penggunaan Dana dan membantu LKMD dalam proses pengambilan dana dari Bank;

Memeriksa Laporan Penggunaan Dana dan membantu LKMD dalam proses pengajuan LPD ke Pimpro untuk pencairan dana bantuan ke KPKN;

Memantau dan mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menjaga keseimbangan antara kemajuan fisik dan kemajuan pembayaran;

Melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas bahan; catatan material dan pembayarannya;

Melakukan pemeriksaan berkala, agar kualitas pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis;

Membantu LKMD dalam mempersiapkan tertib administrasi dan mengawasi pelaksanaannya, khusus mengenai tata-cara pembayaran tenaga kerja;

Bersama Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan pemeriksaan (pra-audit) di salah satu cluster yang lain. Kegiatan Pra-Audit dilakukan

2 (dua) kali , yaitu pada saat kemajuan pekerjaan 30 % dan 80 % dan melaporkan hasilnya ke Sekretariat P3DT Pusat;

Bersama LKMD mengkoordinasikan penggunaan peralatan berat di desa-desa dalam "cluster";

Mengajukan usulan revisi teknis yang diperlukan dengan rekomendasinya kepada Pemimpin Proyek.

d. Pelaporan

Pada penyusunan pelaporan tugas Konsultan Pendamping (KP) telah melakukan kegiatan antara lain :

Membuat laporan bulanan kepada Pimpro dengan tembusan Koordinator KP (Team Leader KP) dan Tim KMT mengenai kemajuan pekerjaan dan biaya dan laporan kegiatan lainnya, sesuai formulir standar yang diberikan untuk semua desa diwilayah kerja tim;

Memberitahukan masalah-masalah yang dihadapi beserta rekomendasinya kepada Pimpro dan Tim KMT;

Melakukan dokumentasi kegiatan sesuai Petunjuk Teknis, termasuk dokumentasi foto-foto;

Menghadiri rapat bulanan yang diadakan oleh Pimpro P3DT di Kabupaten;

Menghadiri rapat triwulanan konsultan yang diadakan oleh perusahaan KP bersama KMT untuk membahas kemajuan dan permasalahan;

Mengumpulkan informasi pemantauan yang diminta oleh sekretariat P3DT;

Memberikan umpan balik terhadap kinerja pelaksanaan tugas KMT yang membawahnya untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi P3DT Popinsi melalui Koordinator KP;

Bersama Ketua Umum (bukan Kepala Desa)/I LKMD membuat Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) untuk disampaikan kepada Pemimpin Proyek;

Membantu LKMD dalam pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) dan pertanggung jawaban keuangan proyek;

8. Aktivitas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Keberhasilan pelaksanaan Program P3DT sangat tergantung kepada keaktifan LKMD dan masyarakat desa. LKMD bertanggung jawab dalam pelaksanaan P3DT di desa, dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu dan dibimbing oleh Konsultan Pendamping .

LKMD dalam pelaksanaan Program telah melakukan tugas antara lain sebagai berikut :

Ketua Umum (bukan Kepala Desa) / Ketua I LKMD membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan Pemimpin Proyek. Dokumen SPPB lengkap dengan gambar lokasi proyek, gambar desain, rencana anggaran biaya, ceklis dampak lingkungan dan

jadwal pelaksanaan.

Mengikuti kegiatan orientasi di Kabupaten untuk mendapatkan penjelasan mengenai tujuan program P3DT, pola pelaksanaan, penyaluran dana bantuan, peran masyarakat, administrasi dan pelaporan dan tugas-tugas LKMD sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

Mengadakan musyawarah dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk KPD, PKK, Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan Karang Taruna, menjelaskan program P3DT, pola pelaksanaan, penyaluran dana, peran masyarakat, administrasi, pelaporan dan persiapan-persiapan untuk membentuk Tim Pelaksana.

Tim Pelaksana LKMD bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan prasarana yang telah direncanakan, mengatur tenaga kerja, mengawasi dan mengendalikan kualitas pekerjaan, mengajukan penarikan dana awal dan dana berikutnya melalui Pimpro, melaksanakan administrasi keuangan, membuat rencana pemeliharaan dan membuat laporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan dan pada akhir proyek LKMD membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) P3DT bersama Pimpro.

Mengkoordinasikan kegiatan penyiapan peran serta masyarakat baik untuk mengoptimalkan manfaat prasarana yang akan dibangun dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, maupun menggali potensi masyarakat baik dalam penyediaan tenaga kerja, sebagai upaya peningkatan kemampuan teknis masyarakat dalam melaksanakan

pembangunan prasarana dan memelihara prasarana yang telah dibangun

Kesimpulan dari hasil analisis masukan (inputs) adalah : Indikator masukan sangat mendukung proses aktivitas program, yang dapat menghasilkan keluaran (outputs) untuk pembangunan prasarana pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat .

Tingginya dukungan inputs terhadap manfaat program dapat diketahui antara lain :

Metodologi Pola Program P3DT melalui Pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknisnya, telah disosialisasikan dan dibagikan oleh Pusat kepada Tim Pembina P3DT Kabupaten, Tim Pelaksana Desa dan para Konsultan.

Jadwal kegiatan program sesuai tahapannya yang dimulai dari persiapan perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan konstruksi, serta pemanfaatan hasil telah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bappenas . Demikian juga jadwal pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik prasarana dapat dilaksanakan tepat waktu, yang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada tanggal 20 Desember 2000

Penyediaan tenaga kerja dapat dilaksanakan sesuai rencana, dukungan tenaga kerja dari masyarakat sangat besar , sasaran penerimaan manfaat sesuai pedoman yaitu mengutamakan tenaga kerja pemuda, wanita dan penduduk miskin.

Untuk mendukung pelaksanaan program P3DT telah dibentuk Tim Koordinasi P3DT di Kabupaten , yang aktivitasnya sangat tinggi, karena adanya tuntutan harus tepat waktu pelaksanaan, dan hasil yang berkualitas, serta menghadapi permasalahan rendahnya kualitas LKMD.

Telah dibentuk Tim Pelaksana (Timlak) Desa yang diketuai Ketua I LKMD, mempunyai aktivitas tinggi, karena adanya tuntutan harus menyelesaikan proyek tepat waktu dengan dana yang besar menurut ukuran desa. Disamping adanya tuntutan akuntabilitas, transparansi dari masyarakat desa.

Dukungan Konsultan pada pelaksanaan Program sangat diperlukan baik sebagai pembantu Tim Koordinasi P3DT Kabupaten maupun Tim Pelaksana Desa (LKMD). Di Kabupaten Grobogan telah disediakan 1 (satu) orang Konsultan Manajemen Teknis (KMT), dan 6 (enam) Konsultan Pendamping (KP) yang mempunyai aktivitas tinggi untuk membantu di bidang teknis dan administratif Tim Pelaksana Desa (LKMD) di 30 desa .

C. Keluaran (*Outputs*)

Untuk memproses masukan (*inputs*) menjadi keluaran (*outputs*) oleh Tim Koordinasi P3DT Kabupaten, Konsultan Manajemen Teknik (KMT), Konsultan Pendamping (KP) dan Tim pelaksana Desa (LKMD) telah dilaksanakan melalui tahapan persiapan program, persiapan dan perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan konstruksi dan tahapan pemanfaatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Program

Pada tahap persiapan program telah dilakukan Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten, sosialisasi awal dan penentuan desa yang membuat proposal, Verifikasi dokumen proposal dan pengumuman daftar ranking desa

2. Tahap persiapan dan perencanaan

Pada tahap persiapan dan perencanaan telah dilakukan Penentuan prioritas verifikasi lapangan, penetapan daftar desa yang lolos verifikasi lapangan, penandatanganan SPPB oleh Pimpro dengan LKMD, penyesuaian pagu dana bantuan dengan hasil survei design dan RAB, dan rekapitulasi hasil design RAB serta pembentukan cluster

3. Persiapan pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan program P3DT telah dilakukan Orientasi teknis di Kabupaten, penetapan desa penerima bantuan P3DT dengan Surat Keputusan Bupati, penyuluhan awal di desa tentang

sosialisasi hasil design dan RAB, pelatihan Kasi PMD Kecamatan, pembentukan Tim Pelaksana, Monitoring di tingkat desa, pelatihan LKMD di desa, dan penyiapan administrasi pengadaan barang, rencana kerja detail, pembuatan papan informasi papan nama proyek dan lembar informasi

4. Tahap Pelaksanaan konstruksi

Pada tahap pelaksanaan konstruksi telah dilakukan penyusunan Rencana Kerja, pelelangan bahan / material, pelaksanaan pekerjaan oleh masyarakat, pengawasan, pemantauan dan pengendalian oleh Kasi PMD dan Konsultan, Monitoring oleh masyarakat (BKD), Penyusunan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) oleh LKMD bersama Konsultan, Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP4) oleh Ketua I LKMD dan Pimpro Pelatihan Operasi dan pemeliharaan proyek, serta serah terima dari Pimpro ke Bupati dan Tim pelaksana (LKMD) kepada masyarakat

5. Tahap pemanfaatan

Pada waktu akan berakhirnya pelaksanaan Program P3DT, untuk kelestarian pemanfaatan program telah dibuat Rencana Operasi pemeliharaan prasarana pelatihan dan pembentukan organisasi pemeliharaan di Desa.

Keluaran (*outputs*) yang telah dihasilkan pada pelaksanaan program P3DT di Kabupaten Grobogan berdasarkan laporan dari konsultan dan wawancara dengan Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas hasil fisik

Kuantitas hasil pelaksanaan pembangunan prasarana fisik Program P3DT, telah menghasilkan volume yang sangat besar dan pelaksanaannya telah dapat diselesaikan 100%, yaitu pada tanggal 20 Desember 2000, atau sebelum berakhirnya Tahun Anggaran tahun 2000

Adapun jenis dan volume hasil pembangunan yang telah berhasil di kerjakan adalah sebagai berikut :

- a. Telah berhasil di bangun/ di rehab jalan desa dengan perkerasan batu (taflon) sepanjang 79.524 m atau 79,52 Km di 28 Desa . Dana untuk perbaikan atau pembangunan jalan tersebut telah dapat menyerap dana sebesar Rp 3,46 milyar atau 76,9% dari total dana yang dialokasi di 30 desa sebesar Rp 4,5 milyar.
- b. Pembangunan jembatan yang telah dapat dibangun oleh 12 Desa sebanyak 21 unit , dengan panjang jembatan secara keseluruhan 202 m . Untuk pembangunan jembatan tersebut telah dapat menyerap dana sebesar Rp 367,43 juta atau 8,17% dari total dana Program P3DT.
- c. Untuk melengkapi pembangunan jalan telah dibuat atau dilakukan pemasangan Gorong-gorong di 12 desa sebanyak 39 unit. Untuk pembangunan gorong-gorong tersebut telah dapat menyerap dana sebesar Rp 87,5 juta atau 1,94% dari

jumlah total dana Program P3DT.

- d. Program P3DT telah berhasil melaksanakan Pembangunan Talud sebanyak 12 unit , sepanjang 391 m di 10 desa. Dana yang terserap dalam pembangunan talud tersebut sebesar Rp 105,33 juta atau 2,34%
- e. Program P3DT sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat telah dapat di bangun pasar desa sebanyak 26 unit kios seluas 1.031 m² di 1 desa, dengan menyerap dana sebesar Rp 151,81 juta atau 3,37% .
- f. Pembangunan air bersih yang telah berhasil dibangun sebanyak 8 unit gardu penampung air , perpipaan sepanjang 2.100 m di desa Temurejo Kecamatan Karangayung , dengan menyerap dana sebesar Rp 119,44 juta atau 2,65 % dari seluruh jumlah dana Program P3DT.

Kuantitas volume hasil yang dibangun melalui Program P3DT sangat besar, yaitu untuk pembangunan jalan yang telah dapat dihasilkan sangat panjang 76,52 Km, dengan menyerap dana sangat besar 76,90% dari dana Program P3DT . Pembangunan lain yang cukup besar adalah pembangunan jembatan yang telah menghasilkan pembangunan jembatan sepanjang 202 m , 21 unit dengan menyerap dana sebesar Rp 367,43 juta atau 8,17 % . Kuantitas volume hasil yang telah dibangun Program P3DT sesuai rencana.

Pilihan pembangunan fisik tersebut merupakan aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan di masing-masing desa, mekanisme usulannya didahului pembuatan proposal yang disahkan Keputusan desa melalui pembahasan di forum Musbang Tingkat Desa. Pelaksanaan pembangunan fisik Program P3DT tersebut oleh masyarakat, dengan bimbingan Konsultan Pendamping (KP) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) serta difasilitasi oleh Tim Koordinasi P3DT Kabupaten dan Kecamatan. Adapun jenis kegiatan dan volume pembangunan fisik Program P3DT sebagai pada (Tabel IV-5)

TABEL IV-5
JENIS KEGIATAN DAN VOLUME HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA P3DT TAHUN 2000
DI KABUPATEN GROBOGAN

NO	KECAMATAN	DESA	DANA FISIK (Juta Rp)	JALAN		JEMBATAN		GORONG GORONG		TALUD		PASAR		AIR BERSIH					
				(m)	(Juta Rp)	(Unit)	(m)	(Juta Rp)	(Unit)	(m)	(Juta Rp)	(Unit)	(m)	(Juta Rp)	(Unit)	(m)	(Juta Rp)		
1	2	3		5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Karangrayung	Parakan	167.000	1.850	85.951	2	26	72.990											
2	Karangrayung	Temurejo	125.000														8	2.100	119.444
3	Tegowanu	Kebon Agung	162.000	2.000	154.121														
4	Tanggungharjo	Ngambakrejo	121.500	5.000	115.500														
5	Tanggungharjo	Kapung	158.000											26	1.031	151.812			
6	Karangrayung	Jetis	150.000	3.260	128.795	1	15	14.955											
7	Geyer	Geyer	192.000	2.950	160.490	2	10	23.277											
8	Grobogan	Rejosari	124.000	3.125	118.048														
9	Purwodadi	Warukaranganyar	148.000	2.475	94.345	1	12	46.987											
10	Purwodadi	Nglobar	134.000	2.910	127.748														
11	Ngaringan	Ngaringan	127.000	2.200	94.730	1	6	25.970											
12	Ngaringan	Ngarap-arap	176.500	3.750	168.194														
13	Ngaringan	Belor	176.000	3.500	168.179														
14	Wirosari	Dapurno	150.000	1.805	78.505	4	103	64.495											
15	Tawangharjo	Plosorejo	131.000	3.500	124.508														
16	Wirosari	Tambatrejo	162.000	2.700	149.338				1	1.249	1	15	3.768						
17	Wirosari	Kalirejo	151.750	2.306	122.237						1	50	21.935						
18	Wirosari	Karangasem	150.000	2.490	115.304	2	6	27.536											
19	Tawangharjo	Tarub	150.000	3.025	122.812				7	11.530		50	8.382						
20	Tawangharjo	Pojok	160.250	3.550	137.970				4	7.203		30	7.611						
21	Grobogan	Putatsari	150.000	2.850	136.155				4	7.822									
22	Grobogan	Lebeng Jumuk	149.000	4.640	97.847	1	3	12.076	7	15.161		70	17.917						
23	Purwodadi	Pulorejo	150.000	2.883	117.469	2	8	22.078	2	4.454									
24	Brati	Jangkungharjo	185.000	3.786	161.710	2	10	10.130				40	5.660						
25	Brati	Lemah Putih	130.000	2.320	113.695				4	10.306									
26	Brati	Tegal Sumur	120.000	1.800	99.263				4	13.149	1		1.589						
27	Klambu	Selojari	150.000	2.033	96.273	2		32.127	2	6.134	2		7.967						
28	Godong	Anggaswangi	150.000	2.187	122.721	1	3	14.905	1	2.429	1		2.446						
29	Godong	Klampok	150.000	2.069	109.890				2	4.858	6	136	28.052						
30	Godong	Kopek	150.000	2.560	139.294				1	3.206									
Jumlah			4.500.000	79.524	3.460.435	21	202	367.425	39	87.499	12	391	105.327	26	1.031	151.812	8	2.100	119.444
Persentase					76,90			8,17	1,94				2,34		3,37				2,65

Sumber : Bappeda Kab. Grobogan, Tahun 2000

2. Kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dengan usulan masyarakat

Program P3DT merupakan hibah dari Pemerintah Pusat , yang dananya langsung diberikan kepada Desa melalui LKMD, oleh sebab itu perencanaan, pelaksanaan , dan pemanfaatan hasil dan tindak lanjut program harus sesuai aspirasi masyarakat..

Jenis kegiatan Program P3DT yang dibangun secara keseluruhan sesuai usulan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari mekanisme perencanaan yang dimulai dengan pembuatan proposal berdasarkan Keputusan desa , di forum Musyawarah Pembangunan desa, yang dihadiri oleh Pengurus dan anggota LKMD , Tokoh Masyarakat, PKK, Ketua RW , Ketua RT, Kepala Dusun. Proposal usulan dari desa tersebut telah dilakukan verifikasi untuk penilaian terhadap kelengkapan administratif dan kenyataan teknis di lapangan, oleh Tim Koordinasi P3DT Kabupaten dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) . Hasil penilaian tersebut sebagai dasar untuk menentukan kelayakan desa untuk mendapatkan bantuan Program P3DT.

Untuk Desa yang proposalnya tidak sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, sesuai ketentuan Bank Dunia telah dimusyawarahkan ulang oleh Aparat desa dengan dibimbing Konsultan dan Tim Koordinasi P3DT Kabupaten, sehingga jenis

kegiatan dan lokasi yang dipilih desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kesesuaian Jenis kegiatan dengan usulan masyarakat cukup tinggi Hal ini dapat diketahui tidak dengan adanya revisi atau perubahan jenis kegiatan pada waktu pelaksanaan . Revisi yang dilakukan pada umumnya hanya perubahan baik disebabkan penambahan atau pengurangan volume yang terkait dengan adanya kenaikan harga bahan material, penambahan tenaga kerja atau kesalahan perhitungan.

3. Tingkat kualitas hasil fisik Program P3DT

Tingkat kualitas hasil fisik program P3DT Tahun 2000 masih cukup baik, hal ini disebabkan oleh baiknya pada waktu pelaksanaan program, dan adanya aktivitas penduduk untuk memelihara prasarana yang telah dibangun.

Pada waktu pelaksanaan program sangat mengutamakan kualitas hasil fisik agar hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat bertahan lama. Untuk menjaga kualitas sangat diperhatikan melalui pengendalian mutu pekerjaan antara lain dengan :

- a. Mengutamakan Target "kualitas" bukan "kuantitas".
- b. Pengendalian kualitas dilaksanakan secara tegas sejak awal.
- c. Mengintensifkan pelaksanaan pekerjaan pada musim

kemarau.

- d. Penyuluhan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan dimulai.
- e. Penyelenggaraan pelatihan secara terus menerus.
- f. Penggunaan system contoh yang kemudian diuji cobakan.
- g. Pemilihan mandor yang dilakukan dengan ketat.
- h. Penggunaan alat-alat kerja yang bermutu.
- i. Ketat dan tegas dalam menerima bahan yang akan digunakan.
- j. Pembuatan sertifikasi kualitas pekerjaan oleh konsultan
- k. Melibatkan kader teknis di desa
- l. Pemeriksaan yang seksama secara berkala.
- m. Apabila terjadi permasalahan dilapangan selalu dilaporkan, dan segera di tindak lanjuti.

Berdasarkan masukan pada forum Musbang Tingkat desa untuk penyusunan Daftar Prioritas (DSP) Tahun 2002, dapat diketahui, masyarakat menghendaki adanya bantuan aspal dari Pemerintah , karena terbatasnya kemampuan swadaya masyarakat dalam bentuk dana. Kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan hanya berupa tenaga kerja untuk kerja bakti. Bappeda Kabupaten Grobogan sudah

merencanakan untuk memberikan bantuan aspal untuk peningkatan kualitas jalan yang telah dibangun melalui program P3DT. Karena terbatasnya dana APBD Kabupaten dan banyaknya desa tertinggal yang mengajukan bantuan aspal, bantuan akan diberikan setelah Program P3DT dimanfaatkan setelah 2 (dua) tahun, atau tahun 2003.

Berdasarkan analisis variabel keluaran (*Outputs*) dapat disimpulkan bahwa tingkat kuantitas hasil fisik, tingkat kesesuaian usulan masyarakat dan tingkat kualitas hasil fisik, keberhasilannya cukup tinggi. Disamping itu dalam pelaksanaannya telah melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan tindak lanjut program yang mengikutsertakan partisipasi desa dan masyarakat.

Kuantitas volume hasil pembangunan fisik Program P3DT sangat besar yang tidak mungkin dapat dikerjakan dari dana APBD Kabupaten maupun swadaya masyarakat, terutama untuk pembangunan jalan yang dapat menghasilkan perkerasan jalan sepanjang 76,52 Km, dengan dana sebesar 3,45 milyar atau 76,92% dari Rp 4,5 milyar.

Jenis kegiatan yang dibangun sesuai aspirasi usulan desa atau masyarakat, yang merupakan Keputusan desa melalui forum Musbang Tingkat desa.

Kualitas hasil pembangunan fisik masih cukup baik meskipun sudah dimanfaatkan selama 2 (dua) tahun. Hal ini menunjukkan Kualitas hasil pelaksanaan dengan menggunakan bahan material yang berkualitas dengan pengawasan Konsultan dengan ketat. Disamping itu masih baiknya kondisi fisik disebabkan adanya partisipasi masyarakat untuk memelihara proyek secara gotong royong.

D. Hasil (*out comes*)

1. Pendukung kegiatan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Manfaat yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat, pada waktu pelaksanaan dan selesainya pembangunan prasarana fisik adalah terciptanya lapangan kerja.

Manfaat program terhadap penciptaan lapangan kerja sangat tinggi. Hal ini dapat diketahui dari 55 responden sebanyak 45 orang (81,82 %) menyatakan sangat bermanfaat, sedang 10 orang (8,18%) menyatakan cukup bermanfaat untuk penciptaan tenaga kerja. (Tabel IV-6)

Pada waktu pelaksanaan program telah dapat menciptakan atau menyerap tenaga kerja baik sebagai pekerja biasa, tukang maupun mandor sebanyak 13.254 orang, yang terdiri dari Tenaga kerja wanita sebanyak 2.768 orang (20,88%), pemuda 3.087 orang (23,29%), dan penduduk miskin 9.748 orang (73,55%). Banyaknya tenaga kerja yang ikut berpartisipasi pada pelaksanaan Program P3DT, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama penduduk miskin, pemuda dan wanita. Tambahan pendapatan di 30 desa tersebut, sebesar Rp 7.000 per hari per orang selama 73 - 120 hari kerja Program P3DT disamping menciptakan lapangan tenaga kerja

juga bisa merubah jenis mata pencaharian penduduk dulunya petani sekarang menjadi buruh bangunan/industri/pedagang dan lainnya. Penciptaan lapangan kerja pada waktu pelaksanaan dan setelah selesainya pembangunan perasarana. Pada waktu pelaksanaan program telah dapat memanfaatkan tenaga kerja setempat, sebagian besar penduduk miskin, pemuda dan wanita.

Tabel IV-6
Manfaat terhadap penciptaan lapangan kerja

No	Manfaat terhadap penciptaan lapangan kerja	Frekuensi	Persen
1	Sangat bermanfaat	45	81,82
2	Cukup bermanfaat	10	8,18
3	Kurang bermanfaat	-	0
4	Tidak bermanfaat	-	
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari Pertanyaan No 14

2. Tingkat cakupan pembangunan prasarana

Salah satu tujuan pembangunan program P3DT adalah untuk pengembangan wilayah dan untuk mengurangi isolasi daerah. Program P3DT diharapkan tercipta peningkatan kelancaran hubungan transportasi baik dari dusun / desa ke Kecamatan dan pasar. Dengan adanya peningkatan kelancaran transportasi barang, jasa dan manusia, diharapkan perekonomian desa dapat meningkat.

Cakupan wilayah pembangunan Program P3DT sudah merata sesuai dengan tujuan program P3DT yaitu untuk mengurangi isolasi daerah, dan untuk pengembangan wilayah desa atau dusun . Hal ini dapat diketahui dari 55 responden, 43 responden (90,91%) menyatakan lokasi pembangunan merata dapat dinikmati oleh seluruh dusun/desa, 12 responden (5,45%) menyatakan hanya mencakup sebagian desa . Tabel IV-7)

Tabel IV- 7
Tingkat Cakupan pembangunan prasarana .

No	Tingkat Cakupan pembangunan prasarana	Frekuensi	%
1	Seluruh dusun/desa	43	90,91
2	Sebagian besar desa/dusun	12	5,45
3	Dua dusun	-	-
4	Satu dusun	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari Pertanyaan No 15

3. Sasaran penerima manfaat

Program P3DT merupakan pembangunan prasarana pendukung untuk mengatasi masalah eksternal, untuk mendukung mengembangkan bantuan permodalan yang telah dibantukan melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sasarannya bukan perorangan atau individu penduduk miskin akan tetapi untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat masyarakat umum

di desa penerima program P3DT. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat umum, bukan kelompok atau golongan tertentu. Hal ini dapat dikeahui dari 55 responden menyatakan seluruh responden (100%) menyatakan sasaran program adalah masyarakat umum. Prinsip Program P3DT telah dilaksanakan dengan mengutamakan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi. Dominasi Aparat desa (elit desa) yang selama ini kurang memperhatikan aspirasi masyarakat umum, yang lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu, atau Aparat sendiri dalam pelaksanaan program P3DT sudah tidak terjadi lagi. Tabel IV-8)

Tabel IV-8
Tingkat sasaran Program pembangunan prasarana

No	Tingkat sasaran Program pembangunan prasarana	Frekuensi	Persen
1	Masyarakat umum	55	100
2	Kelompok miskin	-	-
3	Kelompok masyarakat biasa	-	-
4	Kelompok kaya	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 16

4. Pengembangan wilayah / pengurangan daerah terisolir

Salah satu penyebab kemiskinan adalah masalah eksternal diluar kemampuan penduduk miskin itu sendiri. Masalah eksternal tersebut antara lain disebabkan adanya keterisolasian daerah atau kurang berkembangnya wilayah desa tersebut. Setelah dibangunnya program P3DT ternyata dapat bermanfaat untuk dapat pengembangan wilayah dan pengurangan isolasi daerah. Hal ini dapat diketahui dari 55 responden , 48 responden (87,27%) menyatakan sangat bermanfaat, dan 7 responden 12,73 % menyatakan cukup bermanfaat untuk pengembangan wilayah dan pengurangan isolasi daerah. (Tabel IV-9)

Tabel IV- 9
Pengembangan wilayah / pengurangan daerah terisolir

No	Pengembangan wilayah / pengurangan daerah terisolir	Frekuensi	persen
1	Sangat bermanfaat	48	87,27
2	Cukup bermanfaat	7	12,73
3	Kurang bermanfaat	-	-
4	Tidak bermanfaat	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 17

5. Tingkat kecepatan waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan atau ke Pasar

Manfaat Program P3DT diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh untuk kelancaran arus barang, jasa dan manusia dari desa ke Kecamatan, ke pasar atau kota lain. Dengan kelancaran transportasi; diharapkan hasil pertanian, dan produk industri kecil, tidak rusak sehingga dapat cepat dijual dengan harga tinggi yang berdampak pada meningkatnya pendapatan petani.

Berdasarkan pendapat masyarakat, manfaat Program P3DT sangat tinggi untuk mempercepat waktu perjalanan. Hal ini dapat diketahui dari 55 responden, 39 responden (70,91%) menyatakan hasil prasarana yang dibangun sangat bermanfaat, dan 16 responden (29,09%) menyatakan cukup bermanfaat untuk mempercepat waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan atau ke Pasar (Tabel IV-10)

Tabel IV-10
Tingkat kecepatan waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan atau ke Pasar

No	Tingkat kecepatan waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan atau ke Pasar	Frekuensi	persen
1	Sangat mempercepat	39	70,91
2	Cukup mempercepat	16	29,09
3	Kurang mempercepat	-	-
4	Tidak mempercepat	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 18

6. Tingkat mobilitas penduduk dari desa ke kota atau daerah lain

Program P3DT merupakan Program Pembangunan desa untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Dengan adanya pembangunan di desa diharapkan uang yang beredar di perdesaan semakin meningkat yang bermanfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan penangguran sehingga desa semakin maju. Semakin baiknya prasarana perhubungan desa ke kota, diharapkan penduduk desa tidak perlu pindah ke kota, akan tetapi penduduk yang bekerja di kota dapat dilaju dari desa. Sehingga pendapatan penduduk yang bekerja di kota dapat dimanfaatkan di desa. Dan waktu libur dapat membantu pengembangan pertanian, dan pembanguna desanya.

Berdasarkan pendapat masyarakat Program P3DT cukup bermanfaat untuk meningkatkan mobilitas penduduk, hal ini dapat diketahui dari 55 responden sebanyak 50 responden (90,91%) menyatakan hasil program cukup meningkatkan mobiltas penduduk dari desa ke kota , sedangkan 5 responden (9,09%) yang menyatakan sangat meningkat (Tabel IV-11)

Tabel IV-11
Tingkat mobilitas penduduk dari desa ke kota
atau ke daerah lain

No	Tingkat mobilitas penduduk dari desa ke kota	Frekuensi	%
1	Sangat meningkat	5	9,09
2	Cukup meningkat	50	90,91
3	Kurang meningkat	-	-
4	Tidak meningkat	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 19

7. Tingkat kemudahan penjualan hasil pertanian dan produksi

Program P3DT sebagai program pendukung Program IDT, yang merupakan bantuan permodalan kepada penduduk miskin, bertujuan untuk mengatasi permasalahan kesulitan pemasaran hasil pertanian dan produksi industri kecil penduduk miskin yang

disebabkan sulitnya transportasi .

Berdasarkan pendapat masyarakat hasil pembangunan program P3DT cukup bermanfaat untuk mempermudah penjualan hasil pertanian dan produksi industri masyarakat ke kota atau daerah lain . Hal ini dapat diketahui dari 55 responden , yang menyatakan sangat meningkat 14 responden (25,45%), yang menyatakatkan cukup meningkat 40 responden (72,73%) . Hal ini menunjukkan kelancaran transportasi tidak selalu meningkatkan kemudahan penjualan hasil produksi. (Tabel IV-12)

Tabel IV-12

Tingkat kemudahan penjualan hasil pertanian dan produksi industri masyarakat ke kota atau daerah lain

No	Tingkat kemudahan penjualan hasil pertanian dan produksi industri masyarakat ke kota	Frekuensi	%
1	Sangat mempermudah	14	25,45
2	Cukup mempermudah	40	72,73
3	Kurang mempermudah	1	-
4	Tidak mempermudah	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 20

8. Manfaat terhadap harga barang kebutuhan masyarakat

Penduduk desa sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan karyawan perusahaan, yang pendapatannya rendah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan barang dari kota harganya cukup mahal, karena sulitnya alat transportasi yang masuk ke desa.

Dengan adanya pembangunan prasarana fisik melalui Program P3DT cukup bermanfaat untuk menurunkan harga barang kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari 55 responden 52 responden (94,55%) menyatakan cukup murah, sedang 10 responden (5,45%) menyatakan harga barang kurang murah atau masih cukup mahal. Hal ini menunjukkan harga barang, kurang dipengaruhi oleh adanya biaya ongkos transportasi sebagai dampak pembangunan jalan : (Tabel IV-13)

Tabel IV-13

Tingkat pengaruh terhadap harga barang kebutuhan masyarakat

No	Tingkat pengaruh terhadap harga barang kebutuhan masyarakat	Frekuensi	%
1	Sangat murah	0	0
2	Cukup murah	52	94,55
3	Kurang murah	10	5,45
4	Tidak murah (mahal)	0	0
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 21

9. Tingkat pemakaian transportasi

Dengan semakin baiknya prasarana jalan dan jembatan yang telah dibangun, sangat berpengaruh terhadap kenyamanan berkendara, yang berakibat memperlancar dan mempermudah transportasi barang, jasa dan manusia. Menurut pengamatan dilapangan peningkatan alat transportasi yang mencolok adalah alat transportasi penduduk berupa sepeda motor, baik dipergunakan oleh sendiri, maupun dipergunakan untuk jasa transportasi (ojek)

Berdasarkan pendapat masyarakat tingkat pemakaian alat transportasi modern seperti mobil, sepeda motor, sepeda sangat tinggi. Hal ini dapat dikehauai dari 55 responden, 41 responden (74,55%) menyatakan sangat meningkat, 15 responden (25,45%) menyatakan cukup meningkat. (Tabel IV-14).

Tabel IV-14

Tingkat pemakaian alat transportasi modern
(sepeda motor, mobil)

No	Tingkat pemakaian alat transportasi modern I	Frekuensi	%
1	Sangat meningkat	41	74,55
2	Cukup meningkat	14	25,45
3	Kurang meningkat	-	-
4	Tidak meningkat	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 22

10. Tingkat mobilitas penduduk yang bekerja di kota atau daerah lain

Program P3DT bermanfaat cukup tinggi terhadap peningkatan mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota. Hal ini dapat diketahui dari 55 responden, sebanyak 3 responden (5,45%) menyatakan sangat meningkat, 52 responden (94,55%) menyatakan cukup meningkatkan, dan 2 responden (3,64%) menyatakan kurang meningkatkan mobilitas tenaga kerja. (Tabel IV-15)

Tingginya mobilitas penduduk atau angkatan kerja terutama sebagai akibat adanya kesenjangan pembangunan di perkotaan dan perdesaan, pengangguran dan kemiskinan. Penduduk yang berusia muda yang merupakan Angkatan Kerja potensial banyak yang mencari kerja dan menetap di perkotaan. Penduduk di desa tinggal yang berusia tua, kurang produktif dan potensial untuk pengembangan pertanian. Sebagai penunjang perekonomian di desa.

Urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota menimbulkan banyak permasalahan di perkotaan antara lain rumah kumuh, kekurangan air bersih, kerawan sosial. Program P3DT diharapkan dapat memperlancar transportasi tenaga kerja dari desa ke kota, sehingga meski bekerja di kota tetap bertempat tinggal di desa.

Tabel IV-15
Tingkat mobilitas penduduk yang bekerja di kota
atau daerah lain

No	Tingkat mobilitas penduduk yang bekerja di kota atau daerah	Frekuensi	persen
1	Sangat meningkat	3	5,45
2	Cukup meningkat	52	94,55
3	Kurang meningkat	2	3,64
4	Tidak meningkat	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 23

11. Tingkat Kemampuan masyarakat dalam pembuatan usulan proyek

Tingkat kemampuan masyarakat dalam membuat usulan sangat meningkat, hal dapat diketahui dari 55 responden, 52 responden 94,55 % menyatakan sangat meningkat, hanya 3 responden (5,45%) menyatakan cukup meningkat. (Tabel 16)

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam perencanaan membuat usulan disebabkan adanya pelatihan, pembinaan, sosialisasi oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Kecamatan dan Konsultan yang dimulai sejak adanya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Masyarakat yang tergabung dalam LKMD dilatih untuk dapat memberdayakan Kelompok Masyarakat (Pokmas) miskin agar mampu secara mandiri merencanakan penggunaan bantuan untuk meningkatkan pendapatannya. Pengalaman tersebut dilanjutkan dengan pelatihan dan pembinaan LKMD dan masyarakat untuk membuat proposal untuk pembangunan prasarana fisik yang dibutuhkan oleh desa.

Dalam penyusunan rencana usulan Program P3DT, masyarakat yang tergabung dalam LKMD dibantu oleh Konsulan Pendamping, Kasi PMD Kecamatan melaksanakan :Survei / pengukuran untuk bangunan prasarana yang telah diverifikasi.

Menghitung secara sederhana volume pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, bahan lokal dan non-lokal, peralatan, dan biaya untuk masing-masing jenis prasarana sesuai petunjuk teknis.

Membuat gambar-gambar konstruksi sederhana sesuai petunjuk teknis, dan membuat jadwal kerja pelaksanaan pekerjaan serta menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Tabel IV- 16
Tingkat Kemampuan masyarakat untuk pembuatan
usulan proyek

No	Tingkat Kemampuan masyarakat untuk pembuatan usulan proyek	Frekuensi	Persen
1	Sangat meningkat	52	94,55
2	Cukup meningkat	3	5,45
3	Kurang meningkat	-	-
4	Tidak meningkat	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 24

12. Tingkat aktivitas masyarakat mengikuti pertemuan untuk perencanaan kegiatan proyek

Tingkat aktivitas masyarakat untuk mengikuti pertemuan dalam perencanaan kegiatan proyek sangat tinggi. Hal dapat diketahui dari 55 responden, 44 responden (80%) menyatakan sangat sering ikut pertemuan, 6 responden (10,91%) menyatakan sering ikut pertemuan, 4 responden (7,27%) kadang-kadang ikut pertemuan dan 1 responden (1,81%) menyatakan tidak pernah ikut pertemuan (Tabel IV-17)

Pertemuan untuk perencanaan proyek dilaksanakan sangat sering meskipun secara berjenjang, yang dimulai dari pertemuan tingkat RT yang waktunya disamakan dengan arisan, Tingkat RW atau dusun baru pada tingkat Desa. Pada waktu

sosialisasi program P3DT semua Kepala Keluarga (KK) diwajibkan untuk mengikuti pertemuan. Hal ini untuk menjaga adanya transparansi, demokrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program P3DT.

Bagi warga yang tidak ikut pertemuan rencana kegiatan di sebarluaskan dengan ditempelkan di papan informasi, di tempat umum seperti di Kantor desa, Posko P3DT, dan di Masjid-masjid dan Gereja.

Tabel IV- 17

Tingkat aktivitas masyarakat mengikuti pertemuan
untuk perencanaan kegiatan proyek

No	Tingkat aktivitas masyarakat Mengikuti pertemuan	Frekuensi	Persen
1	Sangat sering ikut pertemuan	44	80
2	Sering ikut pertemuan	6	10,91
3	Kadang-kadang ikut pertemuan	4	7,27
4	Tidak pernah ikut pertemuan	1	1,82
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 25

13. Tingkat kemampuan teknis masyarakat untuk melakukan pembangunan

Tingkat kemampuan teknis masyarakat untuk melakukan pembangunan cukup meningkat, hal dapat diketahui dari 55 responden, 51 responden (92,73%), menyatakan cukup meningkat, 3 responden (5,45%), menyatakan sangat meningkat. (Tabel 18)

Cukup meningkatnya kemampuan teknis ini antara lain disebabkan adanya fasilitasi dari Konsultan Pendamping (KP). Konsultan Pendamping (KP) melakukan pelatihan melalui kegiatan antara lain :

Membimbing anggota LKMD dan Masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan survei/pengukuran;

Memberikan pelatihan kepada Tim Pelaksana (Timlak) mengenai kelengkapan administrasi, pelelangan pengadaan bahan, penarikan, pengeluaran dan pencatatan pada Buku Kas Umum, pertanggung jawaban keuangan dan manajemen konstruksi; Menerangkan desain dan gambar teknis kepada Kepala Kelompok, Mandor dan Kepala Pelaksana;

Memberikan pelatihan khusus (teori dan praktek lapangan) kepada masyarakat sebelum melaksanakan pekerjaan konstruksi;

Membimbing masyarakat mengenai hal-hal teknis yang mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan atau tingkat kemajuan;

Membimbing LKMD dalam menjelaskan mengenai tujuan program, kegiatan, dan kemajuan bantuan P3DT ;

Melakukan bimbingan kegiatan pemberdayaan, transparansi, dan manajemen interaksi di desa melalui kegiatan Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat (SPM);

Melakukan bimbingan terhadap pengaturan tenaga kerja dan dalam peningkatan produktivitas; dan membimbing Tim Pelaksana dalam kegiatan rapat evaluasi di desa maupun di cluster;

Memberi bimbingan khusus mengenai pemanfaatan prasarana desa yang telah dibangun; serta mempersiapkan pengorganisasian, rencana operasional;

Melatih LKMD dalam teknik survei/analisis kebutuhan pemeliharaan dan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan.

Tabel IV- 18

Tingkat kemampuan teknis masyarakat untuk melakukan pembangunan

No	Tingkat kemampuan teknis masyarakat untuk melakukan pembangunan	Frekuensi	Persen
1	Sangat meningkat	3	5,45
2	Cukup meningkat	51	92,73
3	Kurang meningkat	1	1,82
4	Tidak meningkat	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 26

14. Intensitas pelaksanaan koordinasi

Tingkat intensitas mengikuti pertemuan di tingkat RT, RW/Dusun/ Kelurahan sangat tinggi. Hal ini dapat dikeahui dari 55 responden 33

responden (70,91%) menyatakan sangat sering menikuti pertemuan, 5 responden (29,09%) sering mengikuti pertemuan baik di Tingkat RT, RW dan Kelurahan. Pertemuan di Kelurahan dilaksanakan setiap bulan , dan pertemuan di tingkat dusun 35 hari sekali (selapanan) (Tabel IV-19)

Tabel IV-19
Intensitas pelaksanaan koordinasi

No	Intensitas pelaksanaan koordinasi	Frekuensi	Persen
1	Sangat sering mengikuti	39	70,91
2	Sering mengikuti	16	29,09.
3	Kadang-kadang	-	-
4	Tidak pernah mengikuti	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 27

15. Peranan pemuda, wanita dan penduduk miskin dalam pembangunan

Peranan pemuda, dan wanita dalam pembangunan sangat tinggi . hal dapat diketahui dari 55 responden , sebanyak 46 responden (83,64%) menyatakan sangat aktif dalam pembangunan , sedang yang menyatakan seringa ikut aktif sebanyak 9 responden 16,36% (Tabel IV-20)

Partisipasi pemuda, wanita dan penduduk miskin pada waktu pelaksanaan program P3DT sangat tinggi haal ini dapat

diketahui dari 13.254 pekerja , tenaga kerja wanita sebesar 20,88%, pemuda 23,28% dan penduduk miskinnya sebesar 73,55%

Partisipasi pemuda, wanita dan penduduk miskin sebagai penerima manfaat tersebut sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan tindak lanjut program.

Tabel IV- 20

Peranan pemuda, dan wanita dalam pembangunan

No	Peranan pemuda, wanita dan penduduk miskin dalam pembangunan	Frekuensi	persen
1	Sangat aktif mengikuti	46	83,64
2	Sering mengikuti	9	16,36
3	Kadang-kadang	0	0
4	Tidak pernah	0	0
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 28

Kesimpulan Hasil (*out comes*)

1. Tingkat dukungan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat

adalah :

- a. Sangat bermanfaat (81,82%) untuk penciptaan / penyerapan tenaga kerja Sangat bermanfaat (78,18%), untuk pemerataan pembangunan , sampai di tingkat dusun .
- b. Sangat bermanfaat (100%) untuk dapat dinikmati oleh masyarakat umum, bukan hanya kelompok tertentu.

UPT-PUSTAKA-UNRI

- c. Sangat bermanfaat (87,27%) untuk mengurangi isolasi daerah dan pengembangan wilayah .
- d. Sangat bermanfaat (87,27%) untuk mempercepat waktu tempuh perjalanan memperlancar perjalan dari desa ke kota Kecamatan , Pasar atau daerah lain
- e. Bermanfaat (90,91%). untuk mendorong mobilitas penduduk dari desa ke kota,
- f. Cukup bermanfaat (72,73%) untuk membantu kemudahan untuk menjual hasil pertanian dan industri produksi masyarakat.
- g. Cukup bermanfaat (94,55%) untuk membantu penurunan harga kebutuhan masyarakat
- h. Sangat bermanfaat (74,55%) untuk peningkatan pemakaian alat transportasi modern seperti mobil, sepeda motor, sepeda di desa

2. Tingkat kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan

- a. Sangat bermanfaat (94,55 %) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat / LKMD dalam pembuatan usulan perencanaan proyek.
- b. Sangat bermanfaat 94,55%) untuk meningkatkan aktivitas pertemuan untuk membuat usulan perencanaan
- c. Cukup bermanfaat (74%10,91), untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meninguti pertemuan .

- d. Cukup bermanfaat (91,4%). untuk meningkatkan kemampuan teknis masyarakat untuk pelaksanaan fisik
- e. Sangat bermanfaat (70,91%) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pertemuan untuk pembangunan , baik di tingkat RT, RW/Dusun/ Kelurahan
- f. Sangat bermanfaat (83,64%) untuk meningkatkan aktivitas peranan pemuda, dan wanita untuk ikut aktif dalam pembangunan

E. Manfaat (*benefits*)

Indikator manfaat (*benefits*) yang dianalisis dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan pembangunan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi dan peningkatan kemampuan kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan., dengan rincian sebagai berikut :

1. Tingkat penyediaan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi

a. Pendukung kegiatan ekonomi .

Manfaat Program P3DT sebagai pendukung kegiatan ekonomi, diharapkan dapat untuk menciptakan lapangan kerja , peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat . Untuk mengetahui seberapa tingginya manfaat program dapat diketahui dari pendapat masyarakat sebagai berikut :

1) Manfaat pendukung kegiatan ekonomi terhadap peningkatan usaha masyarakat

Program P3DT sebagian besar untuk pembangunan jalan dan jembatan yang berfungsi untuk memperlancar arus barang , jasa dan manusia. Sebagai pendukung kegiatan ekonomi mempunyai manfaat yang tinggi untuk mendukung peningkatan usaha masyarakat.

Hal ini dapat diketahui dari 55 responden, sebanyak 41 responden (74,55%) menyatakan sangat bermanfaat , sedang 14 responden (25,45 %) (Tabel IV-21)

Tabel IV-21

Manfaat terhadap peningkatan usaha masyarakat

No	Manfaat terhadap pening katan usaha masyarakat	Frekuensi	Persen
1	Sangat bermanfaat	41	74,55
2	Cukup bermanfaat	14	25,45
3	Kurang bermanfaat	-	0
4	Tidak bermanfaat	-	0
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 29

2) Tingkat pendukung kegiatan ekonomi terhadap peningkatan pendapatan.

Program P3DT sebagai penunjang kegiatan ekonomi ternyata sangat bermanfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dikehui dari 55 responden , 48 responden (87,27% menyatakan sangat bermanfaat dan 7 responden (12,73 %) menyatakan cukup bermanfaat. (Tabel IV-22)

Program P3DT sebagai program untuk penanggulangan kemiskinan untuk melengkapi Program IDT yang telah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Sebagai program pendukung kegiatan sosial ekonomi, diharapkan dapat mempercepat perkembangan jenis kegiatan / usaha Keluarga miskin sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda Kabupaten Grobogan ternyata jumlah penduduk miskin / Kelurga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) masih tinggi.

Tabel IV- 22

Manfaat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

No	Manfaat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Frekuensi	Persen
1	Sangat bermanfaat	48	87,27
2	Cukup bermanfaat	7	12,73
3	Kurang bermanfaat	-	-
4	Tidak bermanfaat	-	-
		55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 30

2. Pendukung kegiatan sosial

Program P3DT sangat bermanfaat sebagai pendukung kegiatan sosial terutama terhadap kelancaran perjalanan anak sekolah, arisan, mendatangi Warga punya kerja, saling kunjung antar warga, pembinaan aparat desa. Hal ini dapat dikeahui pendapat masyarakat dari 55 responden 43 orang (78,18%) menyatakan prasarana sangat bermanfaat dan 12 responden (21,82%) menyatakan cukup bermanfaat. (Tabel IV-23)

Program P3DT sangat mendukung untuk meningkatkan interaksi Pokmas IDT dengan warga masyarakat umum. Disamping itu sangat membantu kelancaran perjalanan anak sekolah dari Keluarga miskin .

Tabel IV- 23

Manfaat terhadap peningkatan kegiatan sosial, kelancaran perjalanan anak sekolah

No	Manfaat terhadap pening katan kegiatan sosial, kelan caran perjalanan anak sekolah	Frekuensi	persen
1	Sangat bermanfaat	43	78,18
2	Cukup bermanfaat	12	21,82
3	Kurang bermanfaat	-	-
4	Tidak bermanfaat	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 31

3. Perencanaan tindak lanjut program peningkatan prasarana yang dibangun

Program P3DT merupakan bantuan stimulan dari Pemerintah Pusat kepada desa yang memerlukan pembangunan prasarana. Setiap desa hanya diperbolehkan mendapatkan Program P3DT 1 (satu) kali . Karena sifatnya yang stimulan pemeliharaan dan peningkatan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. Untuk mengetahui perencanaan tindak lanjut program untuk peningkatan prasarana yang dibangun dari 55 responden dapat diketahui 21 responden (38,18%), mempunyai rencana untuk diaspal, 3 responden (5,45%) hanya mampu memelihara dengan pasir dan batu dan 31 responden (56,36%) belum merencanakan untuk peningkatan jalan (tabel IV-24)

Karena terbatasnya APBD kabupaten Grobogan, dan banyaknya jumlah desa tertinggal , program P3DT yang telah selesai dibangun baru-mendapatkan giliran bantuan aspal minimal setelah 2 (dua) tahun, atau tahun 2003 .

Tabel IV- 24

Perencanaan tindak lanjut program peningkatan prasarana yang dibangun

No	Perencanaan tindak lanjut program peningkatan prasarana yang dibangun	Frekuensi	persen
1	Direncanakan untuk di aspal	21	38,18
2	Dipelihara dengan pasir dan batu	3	5,45
3	Belum direncanakan ditingkatkan	31	56,36
4	Tidak ada rencana peningkatan	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 32

4. Tingkat kemampuan penduduk untuk memelihara proyek yang sudah dibangun

Kemampuan penduduk untuk memelihara proyek yang telah dibangun cukup mampu. Hal ini dapat dikeahui pendapat masyarakat dari 55 responden. 3 responden menyatakan sangat mampu sedang 51 orang (89,09%) menyatakan cukup mampu. (Tabel IV-25)

Pada waktu kemajuan fisik pekerjaan sudah 100 %, LKMD diwajibkan membentuk organisasi pemeliharaan ditingkat desa, mengesahkan kelompok pemakai/pengguna, membahas dan mengesahkan rencana operasi dan pemeliharaan serta pembiayaannya berdasarkan musyawarah. Konsultan Pendamping bersama Kasi PMD Kecamatan atau Tim Koordinasi P3DT telah memberikan pelatihan dan

bimbingannya mengenai teknis pemeliharaan prasarana kepada Tim Pemelihara dan kelompok pemakai.

Tabel IV- 25

Tingkat kemampuan memelihara proyek

No	Tingkat kemampuan memelihara proyek	Frekuensi	Persen
1	Sangat mampu	3	5,45
2	Cukup mampu	51	89,09
3	Kurang mampu	1	5,45
4	Tidak mampu	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 33

5. Rencana tindak lanjut program pengembangan prasarana

Untuk Keberlanjutan (*sustainability*) program pembangunan, keterlibatan masyarakat kelompok sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut program sangat dibutuhkan. Dari pembelajaran tersebut apabila terjadi kesalahan dapat dijadikan bahan untuk koreksi pada pelaksanaan program selanjutnya, sehingga tidak dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai masukan bagi keberlanjutan program seterusnya.

Perencanaan tindak lanjut program untuk pengembangan prasarana yang dibangun baik memperlebar dan memperpanjang sebagian besar masyarakat belum mempunyai rencana. Berdasarkan pendapat masyarakat dari 55 responden, 31 responden (56,36%) menyatakan belum mempunyai rencana untuk meningkatkan, dan 21

responden (38,18%) hanya mampu mengadakan pemeliharaan dan hanya 3 responden (5,45%) merencanakan untuk meningkatkan. (Tabel IV-26)

Tim / kelompok kerja untuk pemeliharaan proyek sudah dibentuk, akan tetapi aktivitasnya terbatas pada pemeliharaan secara kerja bakti. Dana pemeliharaan dari swadaya masyarakat sangat terbatas , masyarakat umumnya hanya mampu menyediakan tenaga untuk pemeliharaan . Peyediaan dana untuk pembelian aspal dari APBD Kabupaten Grobogan sangat terbatas, sehingga Jalan yang dibangun Program P3DT baru dapat diberikan bantuan aspal setelah 2 (dua) tahun.

Selama proses pelaksana pekerjaan berjalan, konsultan telah memberikan bimbingan terhadap rencana pemanfaatan prasarana yang dibangun kepada LKMD dan masyarakat khususnya kelompok pemakai/pengguna prasarana yang dibangun.

Bimbingan pemanfaatan prasarana yang diberikan meliputi, pengorganisasian, pengoperasian prasarana, pemeliharaan dan pengembangan prasaran sesuai dengan prasarana yang dibangun agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan.

Tabel IV- 26
Perencanaan tindak lanjut program pengembangan prasarana yang dibangun

No	Perencanaan tindak lanjut program pengembangan prasarana yang dibangun	Frekuensi	persen
1	Direncanakan akan diperpanjang	3	5,45
2	Dipelihara jalan yang sudah dibangun.	21	38,18.
3	Belum mempunyai rencana memperpajang	31	56,36
4	Tidak ada rencana untuk memperpanjang	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 34

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pelaksanaan Program P3DT mensyaratkan keterlibatan langsung masyarakat penerima program, sehingga hasil pembangunannya akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sendiri. Dengan demikian hasil pembangunannya akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan Program P3DT adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program, sebagai proses untuk peningkatan kemampuan masyarakat. Masyarakat diberikan *empowerment* (kuasa dan wewenang) dan partisipasi dalam pengelolaan pembangunan proyek. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh

masyarakat penerima program terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan , perencanaan , implementasi, pemanfaatan dan evaluasi program . Disamping itu masyarakat dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan program . Tingginya partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga, belum diimbangi dengan adanya partisipasi dana swadaya masyarakat , dan pemikiran perencanaan yang akan datang. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Program P3DT dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan tenaga kerja cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari 55 responden , 44 responden (80%) menyatakan cukup sering untuk mengikuti Kerja bakti , 5 responden (9,09%) menyatakan sangat sering mengikuti kerja bakti, 6 responden (9,91%) menyatakan kadang-kadang ikut kerja bakti untuk memperbaiki hasil pembangunan (Tabel IV-27) .

Tabel IV- 27
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

No.	Tingkat Partisipasi masyarakat	Frekuensi	Persen
1	Sangat sering mengikuti kerja bakti.	5	9,09
2	Cukup sering ikut kerja bakti	44	80
3	Kadang -kadang ikut kerja bakti	6	10,91
4	Tidak pernah ikut kerja bakti.		
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 35

7. Tingkat ketergantungan bantuan Pemerintah terhadap pemeliharaan bangunan.

Dana P3DT merupakan dana hibah dari Pemerintah kepada masyarakat desa tertinggal untuk memenuhi kebutuhan prasarana desa sesuai keputusan yang diambil oleh masyarakat, namun tidak mengurangi ketentuan kualitas fisik agar fungsi prasarana bertahan lama untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Tingkat ketergantungan penduduk kepada bantuan Pemerintah untuk pemeliharaan bangunan sangat tinggi. Hal ini dapat diketahui dari 55 responden, 45 responden (81,82%) menyatakan sangat memerlukan bantuan pemerintah, 10 responden (18,18%) cukup memerlukan bantuan pemerintah.

Masyarakat mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah Propinsi atau Kabupaten, untuk memberikan bantuan aspal. Kemampuan penduduk untuk berswadaya sangat terbatas, karena penduduknya sebagian besar berpenghasilan rendah. Kemampuan masyarakat desa hanya dapat berpartisipasi tenaga. Dengan adanya pengaspalan jalan diharapkan tingkat pemeliharaan oleh penduduk semakin berkurang, sehingga waktunya dapat dimanfaatkan untuk bekerja. (Tabel IV-28)

Tabel IV-28
Tingkat ketergantungan bantuan pemerintah

No.	Tingkat Ketergantungan bantuan Pemerintah	Frekuensi	persen
1	Sangat memerlukan bantuan pemerintah	45	81,82
2	Cukup memerlukan bantuan pemerintah	10	18,18
3	Kurang memerlukan bantuan pemerintah	-	-
4	Tidak memerlukan bantuan pemerintah	-	-
	Jumlah	55	100

Sumber data : diolah dari pertanyaan No 36

Kesimpulan indikator Manfaat (*benefits*),

1. Manfaat sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

- a. Sangat bermanfaat (74,55%) untuk pengembangan usaha masyarakat;
- b. Sangat bermanfaat (87,27%) untuk peningkatan pendapatan masyarakat, akan tetapi jumlah penduduk miskin dilihat dari jumlah Keluarga Pra KS dan KSI masih tinggi.
- c. Sangat bermanfaat (78,18%) untuk mendukung kegiatan sosial terutama untuk memperlancar perjalanan anak sekolah, pertemuan di tingkat RT, Dusun , kegiatan saling kunjung antar warga

2. Manfaat terhadap peningkatan kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan.

- a. cukup bermanfaat (92,73 %) untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat /LKMD untuk mengadakan pemeliharaan proyek, akan tetapi tergantung kepada bantuan Pemerintah, masih tinggi.
- b. Kurang bermanfaat (56,36 %) untuk mendorong Masyarakat / LKMD dalam perencanaan meningkatkan kuantitas dengan memperpanjang dan melebar prasarajalan dan jembatan
- c. Kurang bermanfaat (56,36 %) untuk mendorong Masyarakat / LKMD dalam perencanaan meningkatkan kualitas dengan mengaspal jalan yang sudah dibangun. Pemda Kabupaten Grobogan belum dapat memberikan bantuan aspal, direncanakan akan memberikan bantuan aspal pada tahun 2003 , setelah proyek berfungsi 2 (dua) tahun
- d. Cukup bermanfaat (80 %) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Kerja bakti memperbaiki prasarana yang telah dibangun.
- e. Kurang bermanfaat (81,82 %), untuk mengurangi ketergantungan Desa /masyarakat kepada bantuan pemerintah, atau ketergantungan kepada bantuan Pemerintah tinggi. Hal ini karena banyaknya jumlah penduduk miskin, sehingga partisipasi dana dan material sangat terbatas. Kemampuan partisipasi yang dapat diberikan masyarakat hanya tenaga kerja.

BAB V.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Masukan (*inputs*)

Dukungan masukan terhadap pelaksanaan Program P3DT sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari :

- a. Bantuan Program P3DT di Kabupaten Grobogan pada tahun 2000 yang dialokasi di 30 desa telah dapat diserap 100%. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan langsung ke desa sebesar Rp 4,5 milyar dan dana Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) di kabupaten sebesar Rp 450 juta
- b. Untuk memperlancar pelaksanaan program telah disosialisasikan dan dibagikan buku pedoman umum dan petunjuk teknis kepada Tim Koordinasi Kabupaten, LKMD dan Konsultan;
- c. Pelaksanaan program dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal kerja rencana Pusat., Sedang pelaksanaan prasarana fisik dapat dilaksanakan tepat waktu , dimulai tanggal 10 September 2000 dan dapat diselesaikan pada tanggal 20 Desember 2000.
- d. Partisipasi tenaga kerja untuk melaksanakan program sangat tinggi. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pada waktu pelaksanaan program sangat besar sebanyak 13.254 orang terdiri dari tenaga kerja wanita 2.768 orang (20,88%) pemuda

- 3.087 orang (23,29%) dan penduduk miskin 9.748 orang (73,55%)
- e. Telah dibentuk Tim Koordinasi Program P3DT di Kabupaten, dan Tim Pelaksana (Timlak) di desa yang beraktivitas tinggi membantu masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan tindak lanjut program.
 - f. Untuk mendukung pelaksanaan program P3DT telah ditempatkan 1 (satu) Konsultan Manajemen Teknis (KMT) di Kabupaten dan 6 (enam) orang Konsultan Pendamping (KP) di desa yang mempunyai aktivitas membantu Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Pelaksana Desa (LKMD).

2. Keluaran (*Outputs*)

Keluaran hasil pelaksanaan Program P3DT sangat tinggi hal dapat dilihat dari hasil keluaran sebagai berikut :

- a. Telah berhasil dibangun perkerasan jalan sepanjang 79.524 m, pembangunan jembatan sepanjang 202 m, pemasangan Gorong-gorong sebanyak 39 unit, pembangunan Talud 12 unit, dengan panjang 391 m, pembangunan pasar desa seluas 1.031 m² dan pembangunan bak penampung air bersih dan perpipaian sepanjang 2.100 m.
- b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan usulan aspirasi dari masyarakat, keterlibatannya mulai dari penysyunan rencana usulan, pelaksanaan dan pemanfaatan tindak lanjut program.

- c. Kualitas hasil program masih cukup baik, karena adanya kualitas bahan material yang dipergunakan dan adanya pemeliharaan oleh masyarakat.

3. Hasil (*Benefits*)

1. Tingkat dukungan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat adalah :

- a. Sangat bermanfaat (81,82%) untuk menyerap atau penciptaan tenaga kerja, terutama penduduk miskin, pemuda, dan wanita.
- b. Sangat bermanfaat (78,18%), untuk pemerataan pembangunan sampai di tingkat dusun , yang merupakan hasil aspirasi masyarakat
- c. Sangat bermanfaat (100%) untuk dapat dinikmati oleh masyarakat umum, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
- d. Sangat bermanfaat (87,27%) untuk mengurangi isolasi daerah dan pengembangan wilayah, kendaraan bermotor roda empat dapat masuk, sehingga adanya peningkatan hubungan komunikasi.
- e. Sangat bermanfaat (87,27%) untuk mempercepat waktu tempuh perjalanan atau memperlancar perjalan dari desa ke kota Kecamatan , Pasar atau daerah lain

- f. Bermanfaat (90,91%). untuk mendorong mobilitas penduduk dari desa ke kota, tenaga kerja yang bekerja di kota dapat di laju dari desa, Desa tidak masih ada tenaga kerja yang membantu desa di bidang pertanian , pembangunan untuk pengembangan perekonomian desa.
- g. Cukup barmanfaat (72,73%) untuk membantu kemudahan untuk menjual hasil pertanian dan industri produksi masyarakat. Akan tetapi karena harga jualnya murah, sehingga tidak dapat meninfkatkan pendapatan masyarakat.
- h. Habya Cukup bermanfaat (94,55%) untuk membantu penurunan harga kebutuhan masayarakat , kelancaran transportasi tidak mempengaruhi muahnya harga kebutuhan.
- i. Sangat bermanfaat (74,55%) untuk peningkatan pemakaian alat transportasi modern seperti mobil, sepeda motor, sepeda di desa

2. Tingkat kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan

- a. Sangat bermanfaat (94,55 %) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat / LKMD dalam pembuatan usulan perencanaan proyek.
- b. Sangat bermanfaat 94,55%) untuk meningkatkan aktivitas pertemuan untuk membuat usulan perencanaan.

- c. Cukup bermanfaat (74,10,91), untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pertemuan .
- d. Cukup bermanfaat (91,4%) . untuk meningkatkan kemampuan teknis masyarakat untuk pelaksanaan fisik . Karena rendahnya kualitas LKMD dan masyarakat , KMT dan KP sangat kesulitan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan administratif, sangat tergantung kepada konsultan.
- e. Sangat bermanfaat (70,91%) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pertemuan untuk pembangunan , baik di tingkat RT, RW/Dusun/ Kelurahan
- f. Sangat bermanfaat (83,64%) untuk meningkatkan aktivitas peranan pemuda, dan wanita untuk ikut aktif dalam pembangunan . Banyaknya tenaga kerja yang ikut bekerja pada proyek, menunjukkan t banyaknya jumlah penduduk miskin dan penganggur di desa.

4. Manfaat (*benefits*),

1. Tingkat dukungan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat adalah :

- a. Sangat bermanfaat (74,55%) untuk pengembangan usaha masyarakat,;
- b. Sangat bermanfaat (87,27%) untuk peningkatan pendapatan masyarakat, akan tetapi jumlah penduduk miskin dilihat dari

jumlah Keluarga Pra KS dan KSI masih banyak.

- c. Sangat bermanfaat (78,18%) untuk mendukung kegiatan sosial terutama untuk memperlancar perjalanan anak sekolah, pertemuan di tingkat RT, Dusun , kegiatan saling kunjung antar warga

2. Manfaat terhadap peningkatan kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan,

- a. Cukup bermanfaat (92,73 %) untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat /LKMD untuk mengadakan pemeliharaan proyek, akan tetapi masih menggantungkan kepada bantuan Pemerintah, masih tinggi.
- b. Kurang bermanfaat (56,36 %) untuk mendorong Masyarakat / LKMD dalam perencanaan meningkatkan kuantitas dengan memperpanjang dan melebar prasarana jalan dan jembatan. Belum mempunyai rasa memiliki terhadap bangunan yang dibuat masyarakat sendiri, mengingat masih menganggap seperti proyek pemerintah.
- c. Kurang bermanfaat (56,36 %) untuk mendorong Masyarakat / LKMD dalam perencanaan meningkatkan kualitas dengan mengaspal jalan yang sudah dibangun. Pemda Kabupaten Grobogan belum dapat memberikan bantuan aspal, direncanakan akan memberikan bantuan aspal pada tahun 2003 , setelah

proyek berfungsi 2 (dua) tahun .

d. Cukup bermanfaat (80 %) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Kerja bakti memperbaiki prasarana yang telah dibangun.

e. Kurang bermanfaat (81,82 %), untuk mengurangi ketergantungan Desa /masyarakat kepada bantuan pemerintah. Tingginya ketergantungan bantuan pembangunan dari Pemerintah , hal ini karena kebiasaan sejak adanya Inpres desa, banyaknya penduduk miskin, dan pengangguran, sehingga partisipasi dalam bentuk dana dan material sangat terbatas. Kemampuan partisipasi yang dapat diberikan masyarakat desa hanya tenaga kerja.

B. Saran

1. Sebagai tindak lanjut program perlu adanya bantuan dana dari Propinsi dan Kabupaten untuk bantuan aspal untuk peningkatan prasarana fisik yang telah dibangun,.
2. Untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin atau Pra KS dan KS I perlu adanya bantuan permodalan secara bergulir untuk pengembangan perekonomian rakyat melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pengembangan agobisnis
3. Untuk mengatasi rendahnya kualitas SDM Aparat desa dan masyarakat perlu adanya pelatihan, fasilitasi, oleh Aparat Kabupaten dan Kecamatan dan Konsultan.
4. Untuk melestarikan pola pemberdayaan masyarakat sistem bantuan P3DT pola swakelola LKMD yang berprinsip Dari Oleh Untuk Masyarakat (DOU), perlu dilanjutkan. Propinsi dan Kabupaten memberikan bantuan dana langsung ke desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Desa .
5. Pengalaman pengeloaan proyek di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan tindak lanjut program , transparan, akuntabilitas dan demokratis, perlu dilestarikan dn ditingkatkan.
6. Dengan adanya Otonomi desa , dan reformasi yang sedang berkembang perlu adanya pembinaan dibidang kelembagaan kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Badan Pertimbangan Desa (BPD), yang merupakan lembaga baru yang sangat menentukan

Keputusan desa.

7. Perlu adanya sosialisasi Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, hal ini untuk meningkatkan pengetahuan Aparat desa LKMD dan LMD, untuk meningkatkan kemandirian dan memotivasi desa dan masyarakat dalam pembangunan.
8. Partisipasi masyarakat dalam bentuk dana dan material perlu digali dan dikembangkan, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki bangunan yang dibuat, dengan demikian secara bertahap dapat dikurangi ketergantungan masyarakat kepada bantuan pembangunan Pemerintah.
9. Aparat Kabupaten dan Kecamatan perlu meningkatkan koordinasi, melakukan monitoring, evaluasi dan merespon usulan dari desa, sebagai bahan untuk penentuan bantuan proyek yang dialokasikan ke desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas , 2000 Keputusan Menteri Negara Perencanaan PPN/Kepala Bappenas No Kep.178/K/07/2000 tentang evaluasi kinerja pembangunan, Jakarta.
- Bappenas, 2000, Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Jakarta
- Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2000, Laporan final Pemantauan Independen Program JPS dan Pemberdayaan Masyarakat, Semarang
- Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2001, Laporan Akhir Evaluasi Pasca Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) Jawa Tengah Semarang .
- Bappeda Propinsi Jawa Tengah , 2000, Laporan Akhir Evaluasi Pasca Proyek Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Nelayan (P3EMDN) Tahun 1998/1999 dan Tahun 1999/2000, Semarang
- Coralie Bryant dan Louise G White 1989, *Manajemen pembangunan untuk negara berkembang* terjemahan Rusyanto I Simatupang Cetakan ke 2 LP3ES, Penerbit PT Gelora Akasara Pratama Jakarta
- Departemen Dalam Negeri, 2000, Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Pola Swakelola , Jakarta.
- Erwindo, dkk 1999, Pembangunan Ekonomi Rakyat di Perdesaan sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan , Penerbit PT Bina Rena Pariwara , Cetakan pertama, Jakarta
- Firman B Aji , S Sirait 1990, Perencanaan dan evaluasi suatu sistem untuk proyek pembangunan , Bumi Aksara , Jakarta .
- Ginandjar Kartasasmita 1996, Pembangunan untuk rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan , Cetakan pertama, PT Pustaka Cidesido, Jakarta

- Gibson, Donnelly, Ivancevich, 1988, *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Gunawan Somodingkrat, 1996, Pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat , penerbit PT Bina Rena Pariwisata (BRP) Cetakan pertama, Jakarta
- Irfan Islami , 2000 Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Edisi ke 2 Cetakan ke 9 Bumi Aksara, Jakarta
- Korten, dan Sjahrir, 1988, *Pembangunan berdemisi Kerakyatan* terjemahan A Setiawan Abadi Yayasan Obor Indonesia , Jakarta.
- Loekman Soetrisno dkk , 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia Diterbitkan ICMI Pusat ICMI Orwil DIY PPSK Yogyakarta
- Lincoln Arsyad 1999, Ekonomi Pembangunan Edisi ke 4 Cetakan pertama, Penerbit Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Masri Singarimbun, 1991, Metodologi Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.
- Miftah Thoha, Drs., MPA., 1983 Perilaku Organisasi, CV. Rajawali, Jakarta.
- Mashuri dan Syarif Hidayat, 2001, Menyingkap akar persoalan ketimpangan ekonomi daerah, Penerbit PT Parmator, Jakarta
- Moch. Nasir, P.Hd., 1983, Metodologi Penelitian, Gramedia, Jakarta.
- Nicholas Henry , 1995 , *Administrasi Negara dan masalah-masalah publik* , penterjemah Luciana D.Lontoh , Cetakan ke 2, penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Sondang P. Siagian, 1986, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1981, Administrasi Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Soul M. Kartz, 1983, Modernisasi Administrasi, Bhineka Aksara, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, Prof., Drs., MA., 1989, Metodologi Riset, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Sutrisno R, Drs., MSi, 2001, Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan Diterbitkan oleh Philosophy Press, Badan Kerjasama Fakultas Filsafat UGM , Yogyakarta;

- Tjahya Supriatna, 1997, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Humaniora Utama* Press Bandung
- Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.2000, *Mengenal Proses Kebijakan Publik* , , Edisi 1 Cetakan 1, Jakarta
- William N Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi ke dua, Cetakan ketiga, terjemahan , Diterbitkan dan dicetak Gajahmada University Press Yogyakarta
- William N Dunn, 2000, *Analisa Kebijakan Publik*, Cetakan keenam , Penyadur Mudjahir darwin, , PT Prasetia Widia Pratama, Distribusi utama Adipura , Yogyakarta
- Robert R Mayer dan Ernest Greenwood 1984 *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial* diterjemahkan Prof Dr Sutan Zanti Arbi, MA dan Dr Wayan Ardhana MA. Penerbit Pustekkon Depdikbud dan CV Rajawali , Jakarta
- Samodra Wibowo, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto, 1994, Cetakan pertama, *Evaluasi Kebijakan Publik* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sadono Sukirno1985, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan dasar Kebijaksanaan*, Lembaga Penerbitan Fak. Ekonomi UI, dengan Bima Grafika, Jakarta
- Soenarko ND, 2000, *Public Policy* Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijakan pemerintah, Airlangga University Press, Surabaya
- Kunarjo, 1995 *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta
- Zulkarnain Djamin , 1984, *Perencanaan dan analisa proyek*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, Jakarta